

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG
MASA PERSIDANGAN IV

TANGGAL : 13,14 DAN 30 NOPEMBER 2012



MEMBAHAS
PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA DPRD

KABUPATEN REMBANG

MASA PERSIDANGAN IV

TANGGAL : 13,14 DAN 30 NOPEMBER 2013



MEMBAHAS

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG

APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0292) 691194

Rembang 59215

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD I KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Hari : SELASA

Tanggal : 13 November 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.

2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 3 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor,
Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten
Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para
wartawan dan semua undangan lainnya
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sebagai insan Pancasila yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, maka marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiratNya atas segala kenikmatan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa.

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok perlu saya sampaikan bahwa dinamika masyarakat Rembang selama bulan Nopember 2012 ini ada beberapa event yang dapat saya apresiasi antara lain :

1. Telah diperingatinya Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 2012 yang lalu dengan Tema “ **Semangat Kepahlawanan Untuk Indonesia Sejahtera** “
2. Tanggal 12 Nopember 2012 yang lalu jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bersama dengan masyarakat dan stake holder kesehatan telah memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke 48 , dengan tema utama “ *Indonesia Sehat* “ ditandai dengan kegiatan upacara maupun kegiatan-kegiatan sosial lain yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Dengan diperingatinya beberapa hari penting yang merupakan sejarah dinamika bangsa Indonesia maka tidaklah berlebihan jika saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya seraya berharap semoga dengan diperingatinya Hari Pahlawan dapat menggugah semangat kita untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab dan pengabdian sebagaimana para pahlawan kita yang telah berjuang demi kejayaan bangsa Indonesia.

Demikian pula kepada semua jajaran maupun stake holder yang peduli dan berupaya agar bidang kesehatan dan pendidikan benar-benar dapat menyentuh kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang sesuai amanat undang-undang bahwa sehat dan memperoleh pendidikan yang layak adalah merupakan hak individu rakyat Indonesia yang harus dihormati dan diupayakan keberhasilannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Proses Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2013 sangat erat kaitannya dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 (KUA-PPAS) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini akan tercermin dalam rencana pendapatan , rencana belanja dan rencana pembiayaan baik menyangkut kegiatan fisik maupun non fisik yang tertuang dalam Rencana Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Selanjutnya marilah kita masuki acara pokok, sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Nopember 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna pertama dari 3 (tiga) Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang diubah

dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan APBD memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Untuk selanjutnya dengan mengucapkan kalimat “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
(Ketuk Palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna hari ini yaitu:

1. Pembukaan.
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.
3. Penutup.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Kepada Saudara Wakil Bupati, saya persilakan.

===== **SAMBUTAN PENJELASAN BUPATI** =====

(Diwakili oleh Wakil Bupati Bpk. H. Abdul Hafidz)

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Wakil Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini yang agenda utamanya adalah "Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013" telah selesai kita ikuti bersama, maka dengan demikian acara Rapat Paripurna hari ini kita akhiri sampai disini, dan akan dilanjutkan Rapat-rapat berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Dan dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamin" tepat pukul 11.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup dan dilanjutkan rapat paripurna kedua besok hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012.


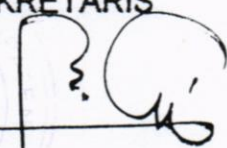
(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

 KETUA

Ir. H. SUNARTO

 SEKRETARIS

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

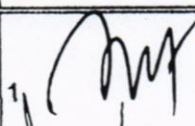
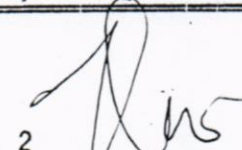


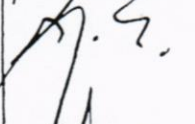
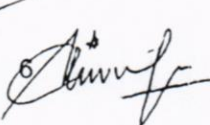
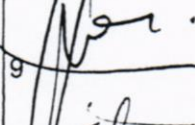








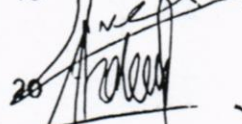



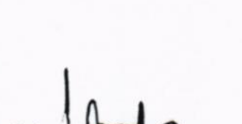
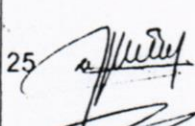


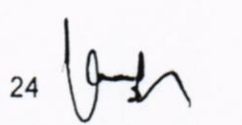
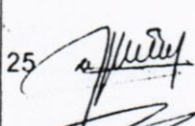
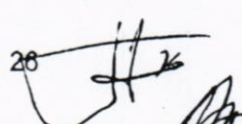



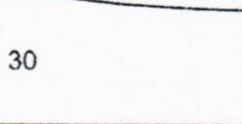
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah, SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang ;**

**LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan raperda tentang
APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2013.**

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013**

**HARI / TANGGAL : SELASA, 13 NOPEMBER 2012
JAM : 09.30 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNO, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H I S M A R I	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota		
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K H MAJID KAMIL, MZ	Wakil Ketua		
18	SA'DULLAH	Anggota		
19	H.M MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota		
23	H YUDIANTO, SH	Anggota		
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S Pd	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>				
31	RIDWAN SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




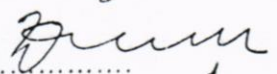
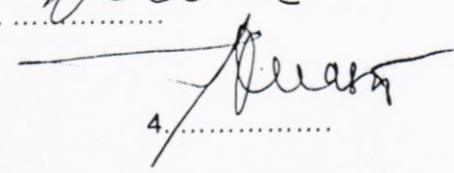
Ketua

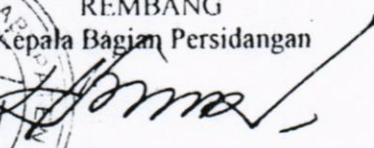
H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
 MEMBAHAS
 RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

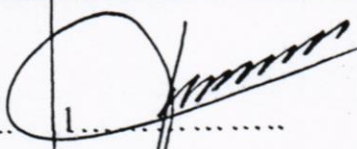
HARI / TANGGAL : SELASA, 13 NOPEMBER 2012
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM		1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.	H. SUNARSO, SH.MH.	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5.	Dandim 0720 Rembang	5.
6.	Kepolisian Resort Rembang	6.
7.	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.	Kejaksaan Negeri Rembang	8.

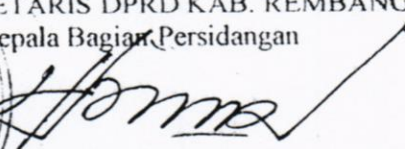
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB.
 REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

 Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : SELASA, 13 NOPEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Galim	
2	Camat Kaliori	2.....
3	Camat Sumber	HERMODO	3.....
4	Camat Sulang	SURISBUTARTO	4.....
5	Camat Bulu	5.....
6	Camat Pamotan	6.....
7	Camat Gunem	Subirno	7.....
8	Camat Sale	SUBHAN	8.....
9	Camat Lasem	ISMANTO	9.....
10	Camat Pancur	Khasihan Effendi	10.....
11	Camat Sedan	WANGYE CETAHU	11.....
12	Camat Sluke	MARIYANTO	12.....
13	Camat Kragan	13.....
14	Camat Sarang	Boekhard S.	14.....



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : SELASA, 13 NOPEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi		3
4	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SDM & Kemasy	4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	WIKOTO	KARUB Bup.	9
10	BAG. HUMAS	M. Damun	Kabag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ARIANA S	Kabag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sulaksana	Kabag	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ulup	Sub. Bp. Perak	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hanjunt		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Suliameli	Supy	15
16	BAG. UMUM	Joeman	Kan	16
17	DPPKAD	SUCIPTONO	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	Drupada	Sekretaris	19
20	BPMPKB	Djuweliy.	Sekretaris	20
21	BKD	ABADI	Sekretaris	21
22	BKP & P4K	WURYANTA	Sekretaris	22
23	BPBD	AJANWATI	Sekretaris	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Ita Yolly	Kep. Sek	24
25	DINAS KESEHATAN	Paiyo Utom	Sekret	25
26	DINAS PENDIDIKAN	BAUDANG SOLO M	SEKDIR	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	MUNTJAH	Kad. Sek	27
28	DINTANHUT	Nurh. Daryah	Aler	28
29	DINLUTKAN			29
30	DINHUBKOMINFO	SUVONO	Ka Dinas	30
31	DINAS DUKCAPIL	MUGAWHO	Sekretaris	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA	Sunarto	Ka Dinas	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa	Sekretaris	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Kep. Sek	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Eji W. m. m. m.	Kep. Sek	37
38	KANTOR PPT	SM Sugiyanti	KPPT	38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Subagno	KATU	40
41	SATPOL PP			41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	My SUPRIYANTO		42
43	P D A M			43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR	HARIYANTO	Dir	45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J			50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG	ari winursh	Kasi Perwilis	52
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD	Pegaw 7P	Ko sub by TV	53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWAGLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Radio Cita Bahari FM	Masudi	Reporter	64
65		Ayu Wanti	SAK FPG	65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90

AN SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Dr. JULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004





**PENGANTAR
NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2013



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Wakil Bupati Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah Nya lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan apresiasi kami khususnya kerjasama yang baik dan optimal antara Eksekutif dengan Legislatif, sehingga berbagai agenda dan tahapan pembangunan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tahapan pembangunan yang kita laksanakan, telah banyak membawa kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, ini adalah berkat upaya, jerih payah dan kerja keras dari kita semua pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang. Keberhasilan yang telah kita capai, hendaknya kita pelihara bersama dan dimanfaatkan secara optimal untuk lebih memacu pembangunan daerah. Sebaliknya terhadap kekurangan yang ada, kita jadikan bahan evaluasi kembali terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada, agar di tahun mendatang dapat terlaksana lebih baik, lebih berhasil guna dan berdaya guna yang lebih riil dirasakan oleh masyarakat.

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini, kami berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

RAPBD yang merupakan instrumen kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan penganggaran, mempunyai posisi sentral dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran difokuskan pada upaya guna mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Setiap kali kita menyusun RAPBD selalu dihadapkan pada permasalahan seberapa besar kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kita dan agenda mana yang menjadi skala prioritas. Pilihan prioritas program dan kegiatan perlu dibahas bersama, selanjutnya menjadi produk kebijakan yang akan diwujudkan dalam bentuk rencana kegiatan yang bersifat indikatif.

Hadirin sidang Dewan yang saya hormati,

Penyusunan RAPBD Tahun 2013 telah diawali dengan perencanaan penganggaran dalam bentuk nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. SKPD melakukan langkah-langkah penajaman terhadap Rencana Kerja Anggaran. Terhadap rencana kegiatan juga melakukan efisiensi terhadap pengeluaran belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, melakukan penajaman belanja modal yang benar-benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan. Semangat untuk membangun infrastruktur bagi peningkatan sendi-sendi perekonomian dan program sosial di bidang pendidikan dan kesehatan sangat menentukan bagi perbaikan

kesejahteraan rakyat dan dalam rangka akselerasi pertumbuhan daerah melalui peningkatan produktifitas, akses modal UMKM, Pertumbuhan investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2013 di arahkan untuk :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang didukung optimalisasi pengarusutamaan gender dan hak anak.
- 2) Meningkatkan kesempatan berusaha, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat terutama di pedesaan, menciptakan lapangan kerja dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.
- 3) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Akses Modal UMKM, Pertumbuhan investasi dan PAD.
- 4) Meningkatkan mutu dan produktifitas produk unggulan yang didukung pengembangan UMKM, peningkatan investasi dan infrastruktur wilayah menuju kemajuan dan kemandirian daerah.
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam serta pelestarian lingkungan.
- 6) Meningkatkan program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui penyusunan rancangan kebijakan dan studi pembangunan di Kabupaten Rembang.
- 7) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian visi misi serta arah kebijakan pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
- 2) Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM.
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM.

- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
- 5) Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- 6) Keberlanjutan program prioritas 4 pilar, meliputi :
 - a) Meningkatnya kualitas cakupan layanan sekolah gratis
 - b) Meningkatnya infrastruktur pengembangan ekonomi
 - c) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - d) Meningkatnya pengembangan ekonomi rakyat

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dijelaskan sebagai berikut :

1. **Penganggaran Pendapatan Daerah**

Besaran proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 108.012.530.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.970.738.200,00 dibandingkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 95.041.791.800,00

Besaran Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 640.273.360.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.818.412.000,00 dibandingkan besaran DAU pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 570.454.948.000,00 . Sedangkan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 56.771.470.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.579.190.000,00 dibandingkan DAK

pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 78.350.660.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi beserta belanja kegiatannya belum dicantumkan karena sampai saat ini belum ada penetapan dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Propinsi.

2. Penganggaran Belanja Daerah

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah jelas peruntukannya, ada beberapa kegiatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2013 yang menunjang Pembangunan Daerah antara lain :

- Hibah kepada SMP/SMA/SMK/MA swasta
- Beberapa Kegiatan Peningkatan Sarpras Dinas Pendidikan
- Beberapa Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru
- Pendampingan Akademi Komunitas
- Pembangunan & Penyediaan Sarpras Puskesmas Sarang II
- Penyediaan Pembiayaan JKRS
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kabupaten
- Penyusunan Masterplan Kawasan Industri
- Pembangunan Menara Suar di Desa Tasikagung
- Pendeteksian Ranjau Laut Deshidros
- Peningkatan prasarana Pasar Rembang
- Hibah utk PMI Rembang
- Belanja Fasilitasi Kegiatan Ormas & Keagamaan
- Bantuan Keuangan (ADD & Tunjangan Kades/Katdes)
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades
- Bimtek Bagi Kepala Desa
- Fasilitasi Verifikasi Data Hasil PPLS 2011
- Penyelenggaraan Pasar Murah
- Pembangunan Depo Arsip
- Peningkatan Promosi Wisata
- Pembangunan gedung & Sarpras Lab Geologi
- Pendampingan Air Bersih TPI se-Kab Rembang
- Peningkatan Sarpras Pengolahan Hasil Perikanan

3. Penganggaran Pembiayaan Daerah

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah maka dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 kami mencantumkan Penyertaan Modal sebesar Rp. 5.200.000.000,00 terdiri atas penyertaan modal pada :

1. PD Bank Pasar sebesar Rp. 3.500.000.000,00
2. PD BPR BKK Lasem sebesar Rp. 1.000.000.000,00
3. PDAM sebesar Rp. 700.000.000,00

Secara rinci, berikut kami ringkasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 :

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	884.284.031.000,00
Pendapatan Asli Daerah	108.012.530.000,00
Pendapatan Pajak Daerah	23.002.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	23.137.374.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.685.706.000,00
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.187.450.000,00
Dana Perimbangan	734.617.850.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.573.020.000,00
Dana Alokasi Umum	640.273.360.000,00
Dana Alokasi Khusus	56.771.470.000,00
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	41.653.651.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.653.651.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
BELANJA	889.229.031.000,00
Belanja Tidak Langsung	547.973.700.000,00
Belanja Pegawai	478.683.363.000,00
Belanja Bunga	37.000.000,00
Belanja Subsidi	723.000.000,00
Belanja Hibah	30.584.991.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.730.596.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	32.214.750.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
Belanja Langsung	341.255.331.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(4.945.000.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.200.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	10.200.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.255.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.200.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	4.945.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, mengingat Rancangan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang harus kita pertanggungjawabkan, maka Saya berharap agar dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 segera dibahas melalui mekanisme yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 13 Nopember 2012

BUPATI REMBANG

The image shows the official seal of the Bupati of Rembang, which is a circular emblem with a central figure and the text 'BUPATI REMBANG' around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

H. MOCH. SALIM, M. Hum

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD II KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Hari : RABU

Tanggal : 14 November 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.

2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : Ir. H. SUNARTO

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 3 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat
se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua
undangan lainnya.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, kita sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa , marilah terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadiratNya atas segala limpahan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dengan acara membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Nopember 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna kedua dari 3 (tiga) Rapat Paripurna yang diagendakan dalam rangka pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2013, dengan acara pokok “Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2013” dan “ Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2013”.

Selanjutnya sebelum memasuki acara pokok maka perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan APBD memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Sementara itu menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang saat ini bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum, sehingga rapat paripurna dapat diteruskan. Selanjutnya dengan mengucap “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pokok dalam paripurna pertama tanggal 13 November 2012 yang lalu adalah penjelasan Bupati atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2013, untuk selanjutnya yang menjadi agenda pokok paripurna kedua hari ini adalah “*Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2013*” dan dilanjutkan dengan “*Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013*”.

Untuk lebih jelasnya saya sampaikan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.

2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2013.
3. Skors
4. Penyampaian Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.
5. Penutup.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Kepada Saudara-saudara yang mewakili Fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Demokrat : H. HIKMAH PURNAMAWATI
2. Fraksi Partai Golkar : SUCI RAHAYU, SH
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: H. YUDIANTO, SH
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP, MSi
5. Fraksi PDI Perjuangan : SUPRIHADI
6. Fraksi Amanat Nasional : MOCH IMAM ZARKASI
7. Fraksi Bintang Keadilan : dr. ROCHMAD ISNAINI

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilakan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Dipersilakan,

=====PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI=====

1. Fraksi Demokrat : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI
- Membaca Teks Terlampir

2. Fraksi Partai Golkar : SUCI RAHAYU, SH
- Membaca Teks Terlampir
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: H. YUDIANTO, SH
- Membaca Teks Terlampir
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP, MH
- Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : SUPRIHADI
- Membaca Teks Terlampir
6. Fraksi Amanat Nasional : MOCH IMAM ZARKASI
- Membaca Teks Terlampir
7. Fraksi Bintang Keadilan : dr. ROCHMAD ISNAINI
- Membaca Teks Terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksi masing-masing dalam penyampaian Pemandangan Umumnya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya sebelum kita teruskan pada acara berikutnya, Rapat Paripurna saya skors selama 1 (satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Bupati untuk mempersiapkan jawaban atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

(Ketuk Palu 1 kali)

➤ **INTERUPSI**

- **RIDWAN, SH (Fraksi PDI Perjuangan)**

Sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Banmus DPRD Kab.

Rembang untuk Agenda Rapat Paripurna dimulai kembali pukul

13.00 WIB. Jadi tidak merubah jadwal yang telah disepakati oleh Banmus DPRD

▪ **JAWABAN PIMPINAN RAPAT**

Bisa diterima

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Setelah Rapat Paripurna kita tunda selama 1 (satu) jam dan waktu skors telah berakhir maka Rapat Paripurna hari ini saya buka kembali.

(Ketuk Palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat

Selanjutnya marilah kita ikuti acara ketiga, yaitu Penyampaian Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Kepada Saudara Wakil Bupati, saya persilakan.

===== *PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI REMBANG* =====

(diwakili oleh Wakil Bupati oleh Bpk. H. Abdul Hafidz)

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Wakil Bupati yang telah menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Peserta Rapat dan hadirin yang terhormat.

Demikian acara Rapat Paripurna DPRD telah kita ikuti bersama maka agenda pokok hari ini selesai, dan akan dilanjutkan rapat-rapat berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Dan dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat pukul 15.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup dan dilanjutkan rapat paripurna ketiga atau yang terakhir setelah dilaksanakan pembahasan – pembahasan baik oleh Komisi bersama SKPD maupun Badan Anggaran bersama Pimpinan Komisi dan TAPD, yang diagendakan tanggal besok hari Jum'at tanggal 30 November 2012 yang akan datang.

(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ir. H. SUNARTO



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN
REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

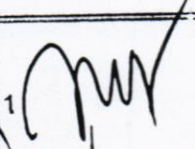

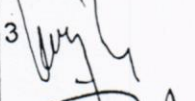



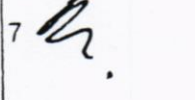























LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan SKPD. Se Kabupaten Rembang ;

LAMPIRAN II : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN III : Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Rembang.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA II
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013**

**HARI / TANGGAL : RABU, 14 NOPEMBER 2012
JAM : 09.30 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNO, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMRO' ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		S
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		C
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
12	GATOT PAERAN, SH. MSI	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H I S M A R I	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota		
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL, MZ	Wakil Ketua		C
18	SA'DULLAH	Anggota		
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H M SHODIQIN YASIR	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>				
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	S
<u>FRAKSI PINTANG KEADILAN</u>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMRIURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	S

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



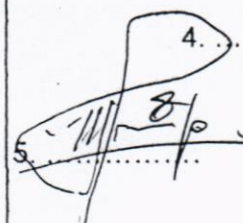


Ketua

H. H. SUNARTO

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
 MEMBAHAS
 RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : RABU, 14 NOPEMBER 2012
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM		1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.	<i>KAPTEN SAMPIK</i>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6.	Kepolisian Resort Rembang	6.
7.	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.	Kejaksaan Negeri Rembang	8.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

 Dps. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : RABU, 14 NOPEMBER 2012

PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	1.....
2	Camat Kaliori	MUSTOFICHA	2.....
3	Camat Sumber	TAMIKAN . SST.	3.....
4	Camat Sulang	SUKISRIARTO	4.....
5	Camat Bulu	SUSWANTORO	5.....
6	Camat Pamotan	M. WIYARTO	6.....
7	Camat Gunem	7.....
8	Camat Sale	Moch. Dahuri	8.....
9	Camat Lasem	9.....
10	Camat Pancur	Suharti	10.....
11	Camat Sedan	HAR. WADYANTORO	11.....
12	Camat Sluke	Agus Subroto	12.....
13	Camat Kragan	Mashadi	13.....
14	Camat Sarang	14.....

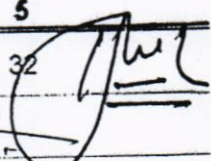
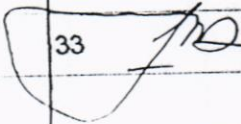
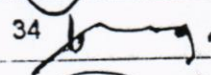
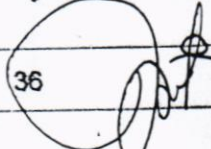

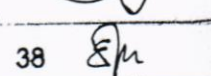
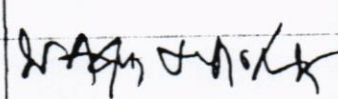

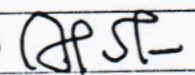
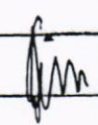
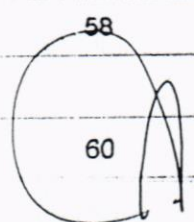
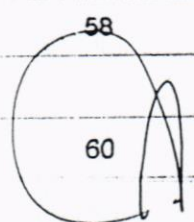
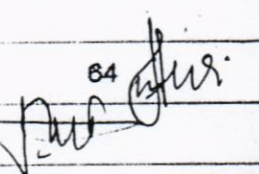
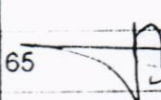
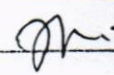
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan


Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : RABU, 14 NOPEMBER 2012
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	LADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Musrahin		1
2	STAF AHLI BUPATI	Susanto	SA B	2
3	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SDM & Kemasy	3
4	STAF AHLI BUPATI	Haris Effendi	PHP	4
5	AS'STEN I SEKDA			5
6	AS'STEN II SEKDA	Suyono	As H	6
7	AS'STEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Henri Shifa	Kasubag PUM	8
9	BAG. HUKUM	Wiyoto	Ka Sub Bag	9
10	BA 3. HUMAS	M Drenuri	Kabag humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Arif S	Kasubag	11
12	BAG. ADM PEREKONOMIAN	Suharwan	Ka bag	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAIKYAT	Abdullah		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hengus	Kasubag	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Sukarnah	Kasubag	15
16	BAG. UMUM	Drenuri	Ka Umum	16
17	DPPKAD	SUCIPTONO	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	Soebagyo	Inspektur	18
19	BAPPEDA	Haris	Ka	19
20	BPI PKB	Slamet Rarupuh	Kesbpd Bm	20
21	B K D	Septamin		21
22	BKF & P4K	SRI HARABANDARI	KABID. KP.	22
23	BPBD	Anjane	Sekretaris	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Juhyoko	Ka Dp.	24
25	DINAS KESEHATAN	Endo Ceno	Kasubag. Perencanaan	25
26	DINAS PENDIDIKAN	BAUBAH SOLO M.	Sekdus.	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntaha	Kodim.	27
28	DINTANHUT	Sirata Min	Ka Dintambut	28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29
30	DINHUBKOMINFO	SUYONO	Ka Humas	30
31	DINAS DUKCAPIL	Muhammad	Sekdus	31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO		32 
33	DINBUDPARPORA	SURYANTY	sek	33 
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryosa		34 
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	SUGIHARTO,	KA. Si	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	I. S. Winarso	Kapustan	37 
38	KANTOR PPT	Ety Purbiyanti	Ka. Sub Bag TU	38 
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			39
40	RISUD dr. R. SUTRASNO			40 
41	SATPOL PP			41
42	T.M PKK KAB. REMBANG			42
43	P D A M	Hernawan H	kebag	43 
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PJ. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	TRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALICRI			49
50	R B S J			50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG	WINARSO	KASI STAI PRODUKSI	52 
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59 
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Sul'fi'yan	Sekretaris	60 
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Repositor	64 
65	Radio Al-Iqbal	R. S. D	Staf Informatika	65 
66	Wilke Oksinjo	Staf ahli folk.		66 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67		Agus W	Staf FPG	67 
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan
Dr. JULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004



JAWABAN BUPATI REMBANG

**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2013



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang,
- Saudara Wakil Bupati Rembang,
- Tamu undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran eksekutif yang berbahagia.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI DEMOKRAT	
1.	<p>Mengenai pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata sampai kedesa-desa dimana masih ditemukan balita yang menderita gizi buruk sampai ada yang meninggal dunia, untuk itu kami mohon kepada dinas terkait agar lebih sering turun ke lapangan. Pelayanan masih kurang memuaskan terutama yang memiliki JAMKESMAS berbeda dengan yang membayar biasa</p>	<p>1. Di Kab. Rembang gizi buruk (Berat Badan /Tinggi Badan) masih ada 32 orang, gizi buruk disebabkan oleh masalah yang sangat komprehensif. antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Kesehatan lingkungan yang tidak sehat 3. Pelayanan kesehatan 4. Pengetahuan masyarakat, dll <p>Hal ini membutuhkan penanggulangan dari banyak sektor terkait. Yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rembang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan langsung (door to door) dan kelompok (Posyandu) sasaran. 2. Pemeriksaan Kesehatan dan status gizi 3. Rujukan ke Puskesmas Perawatan/Rumah Sakit dengan diberi Living cost (sebesar Rp. 30.000,-/hari). 4. Pemberian makanan tambahan Rp. 7.500,-/hari selama 180 hari <p>Gizi buruk di Kab. Rembang sebagian besar terdapat pada Gakin, dan sebagian besar karena komplikasi penyakit.</p>
2.	<p>Pedagang yang ada di Pasar Rembang kota khususnya yang memakai badan jalan supaya ditata kembali karena setiap pagi terjadi kesemrawutan dan tidak nyaman untuk berbelanja.</p>	<p>2. Jumlah kios dan los didalam pasar telah terpenuhi oleh pedagang sejumlah 1.547 pedagang sehingga tidak mungkin untuk dimasukkan dalam pasar sedangkan para pedagang yang ada dibahu jalan sejumlah 82 pedagang. Kesemrawutan dibahu jalan tidak hanya disebabkan oleh para pedagang akan tetapi juga kurangnya sarana penunjang pasar seperti terminal barang dan angkutan dalam lingkungan pasar.</p>
3.	<p>Agar supaya lampu penerangan didaerah perbatasan (Sarang - Kaliori) segera direalisasi.</p>	<p>3. Telah dianggarkan dalam APBD Perubahan T.A 2012 Kegiatan : Pengadaan konstruksi LPJU Nilai : Rp. 993.000.000,- (120 titik) Sekarang baru tahap proses lelang.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>Khusus untuk jalur alternative supaya dipasang rambu-rambu bila ada kemacetan di Pantura, mengenai parkir truk-truk besar yang diparkir dibahu jalan mulai Lasem sampai Kallori sangat mengganggu pengguna jalan lain terutama di sekitar SPBU Tireman.</p>	<p>Semua jalur alternative yang dipersiapkan untuk mengantisipasi bila jalur pantura mengalami kemacetan sejak tahun 2010 sudah dipasang rambu-rambu baik rambu penunjuk arah maupun rambu peringatan yang setiap tahunnya diadakan penambahan pada lokasi lokasi jalan yang dipandang perlu.</p> <p>Truk-truk besar yang parkir dibahu jalan pantura terutama di depan SPBU Tireman lebih disebabkan karena Kab. Rembang belum memiliki jalur lingkaran, namun penataannya diatur dalam satu sisi yaitu disisi utara jalan.</p>
4.	<p>Monon sering diadakan operasi siswa yang membolos yang selalu nongkrong diwarung-warung kopi.</p>	<p>4. Kami perhatikan dan akan ditindaklanjuti.</p>
5.	<p>Jalan akses tengah dan timur masuk ke PPI Tasikagung supaya dilebarkan dan diadakan perbaikan.</p>	<p>5. Sampai sekarang masih dalam tahap pengkajian yang mendalam baik dari sisi biaya maupun dampak sosialnya mengingat dikiri – kanan jalan masuk PPI Tasikagung dari sebelah timur merupakan pemukiman penduduk yang cukup padat.</p>
6.	<p>Dengan perencanaan anggaran induk 2013 dibidang Bina Marga dimohon dibuat prioritas untuk memperbaiki jalan yang rusak parah terlebih dahulu.</p>	<p>6. Kami sependapat, bahwa penanganan akan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan kabupaten antar kecamatan yang sudah rusak parah termasuk kerusakan jalan sebagai dampak kemacetan jalan nasional yang sedang diperbaiki.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI GOLONGAN KARYA	
1.	Pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang TA 2013 yang terkesan tergesa-gesa. DPRD berharap RKA SKPD sudah tersaji sebelum pembahasan.	1. Kami Setuju dan RKA SKPD akan segera kami sampaikan sebelum pembahasan ditingkat komisi.
2.	PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah, namun ditengarai sumber PAD masih didominasi dari pajak daerah, padahal masih banyak sumber pendapatan daerah lain yang masih bisa ditingkatkan pemasukannya. Misal dari asset yang dipisahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah, kami melihat penerimaan Deviden belum sebanding dengan penyertaan modal yang digelontorkan.	2. Bahwa penerimaan yang berasal dari deviden selain dipengaruhi oleh besarnya penyertaan modal, namun ada hal yang lebih menentukan adalah besarnya keuntungan yang dicapai masing-masing BUMD, untuk itu waktu mendatang kami berupaya untuk bisa menaikkan penerimaan dari deviden BUMD.
3.	Pendapatan dari sector pertambangan/galian C belum sepadan dengan kerusakan infrastruktur maupun kerusakan lingkungan akibat eksploitasi. Sehingga perlu peningkatan pemasukan disamping perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi akibat kerusakan lingkungan.	3. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk penerimaan pajak mineral bukan logam dan galian gol c kami selalu berupaya terus akan peningkatan intensifikasi pemungutannya diantaranya melakukan kerjasama dengan PT Semen Gresik dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya untuk jenis trass. ❖ Meningkatkan pengawasan lapangan terkait dengan penambang baru yang belum kena pajak untuk segera bisa dikenakan pajaknya. ❖ Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak yang macet.
4.	Himbauan agar BLUD RSU dr.Soetrasno Rembang meningkatkan pelayanan parkir, untuk dibuatkan peneduh untuk kendaraan, sehingga tidak sekedar mengejar uang parkir.	4. Terimakasih atas apresiasinya dan kami perhatikan untuk kelengkapan tempat parkir akan kami koordinasikan dengan Dinhubkominfo.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1	<p>Seberapa besar deviden dari Perusahaan-Perusahaan Daerah yakni: PD.Bank Pasar, PD.BPR BKK Lasem, PDAM, PT.RBSJ dan yang lain, apalagi pada tahun anggaran 2013 terdapat penyertaan modal sebesar Rp.5.200.000.000,00; untuk PD.Bank Pasar sebesar RP.3.5 Milyar, PD.BPR BKK Lasem sebesar Rp. 1 Milyar dan PDAM sebesar Rp. 700.000.000,00; jadi sesuatu yang niscaya adanya bagi hasil/deviden yang meningkat pula bagi kontribusi pendapatan daerah (PAD) bagi Rembang tercinta ini.</p>	<p>PAD pada Tahun yang bersumber dari bagian laba Perusda pada dasarnya merupakan dari hasil kinerja per desember 2012 atas penyertaan modal pada perusda. Terdapat kenaikan deviden perusda yaitu pada Unit Apotik Rembang. Sedangkan untuk PD.BPR BKK Lasem mengalami penurunan disebabkan deviden pada tahun 2012 terdapat tambahan pembagian deviden atas laba ditahan tahun 2009 dan 2010, sementara disisi lainn terdapat penurunan komposisi kepemilikan saham Pemkab Rembang.</p> <p>Untuk PDAM dan PD BKK Kaliori pada tahun 2013 dimungkinkan adanya setoran deviden karena PD BKK Kaliori per desember 2012 telah BEP bahkan surplus. Sedangkan untuk PD BPR Bank Pasar, PT.RBSJ dan Unit Percetakan daerah belum menyetorkan deviden disebabkan masih adanya akumulasi kerugian tahun lalu.</p> <p>Pada hakekatnya penyertaan modal pada perusahaan daerah bertujuan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penyehatan perusda; 2. Membantu likuiditas perusda;
2.	<p>Bahwa Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2013 ini dalam rangkai pencapaian visi misi antar lain adalah adanya program sekolah gratis yang bermutu yang menjadi salah satu 4 Pilar Pokok Pembangunan di Kabupaten Rembang, FP3 dan masyarakat pada umumnya sangat memberikan apresiasi positif terhadap program tersebut, termasuk penyediaan beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK Negeri maupun Swasta dari keluarga kurang mampu serta hibah kepada SMP/MTs/SMA/MA/SMK Swasta.</p>	<p>Mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang positif terhadap program sekolah gratis yang bermutu dan penyediaan beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK Negeri maupun Swasta dari keluarga kurang mampu, serta hibah kepada SMA/MA/SMK Swasta semoga bermanfaat dalam memberikan layanan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>Aplikasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan: Perda Pendidikan sampai dengan tahapan penyusunan Perbup sejumlah 11 (sebelas) Perbup, untuk aplikasinya sebagai berikut :</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Tata cara dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen Kepala Sekolah dengan berpedoman kepada Perbup Nomor 34 Tahun 2008. - Pelaksanaan seleksi melalui test dengan melakukan MOU dengan LPMP sebagai pelaksana seleksi tertulis dan wawancara - Untuk Peningkatan Mutu MBS telah dilaksanakan bahkan telah dibentuk Tim Pengembang Pendidikan dan Tim Teknis (MBS, inklusi dan ramah anak) - Untuk PPDB melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perda dan juga PP Nomor 17 Tahun 2010 - Terkait dengan Sekolah Luar Biasa telah melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi untuk pendirian SLB khususnya SDLB di eks kawedanan Kragan, Sulang dan Pamotan, bahkan tahun 2013 direncanakan di Kawedanan Pamotan sudah operasional - Pengembangan Sekolah Inklusi untuk melayani anak berkebutuhan khusus, Pemerintah Kabupaten Rembang bekerjasama dengan PLAN melaksanakan pengembangan Sekolah Inklusi baik di SD maupun SMP - Telah dilaksanakan berbagai program di Bidang Pendidikan Non Formal, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Formal, Non Formal, Informal); • Pendidikan Masyarakat, antara lain Pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan kecakapan hidup; • Pendidikan Kesetaraan, antara lain Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C.
3.	Kita telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pendidikan sejauh mana Perda ini diberlakukan.	Telah terlaksanakannya pelaksanaan kegiatan sarana prasarana yang meliputi Rehabilitasi ruang kelas sedang dan berat, mulai dari PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK, baik dari dana Block Grant, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
4.	<p>Sebagaimana kita tahu dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi hal ini janganlah menjadikan sebab "sulitnya" memproses pencairan dana hibah tersebut bagi penerimanya, atau mungkinkah karena kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut.</p>	<p>Terkait dengan Belanja Hibah dan Bansos yang mekanismenya telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Panatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Telah kami sosialisasikan kepada seluruh SKPD dan Jajaran yang terkait, sedangkan ketentuan serta pencairan belanja hibah dan bansos semata-mata memenuhi proses dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan sebagaimana tersebut diatas.</p>
5.	<p>Dibidang Kesehatan, sebagai salah satu dari empat Pilar Program Pemerintah Kabupaten Rembang, FP3 melihat bahwa pelayanan kesehatan sudah makin membaik, tetapi sayang FP3 masih melihat adanya keengganan masyarakat menggunakan program jaminan kesehatan rembang sehat (JKRS), ini disebabkan antara lain proses administrasi yang masih dirasa sulit dan juga kekawatiran bagi sebagian masyarakat bahwa pasien yang menggunakan program JKRS tidak/kurang dilayani dengan baik.FP3 meminta agar sosialisasi terkait hal tersebut lebih ditingkatkan sehingga ada pemahaman masyarakat bahwa pengguna program JKRS itu sebenarnya tidak gratis tetapi beayanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten rembang</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan sosialisasi ke Kecamatan yang dihadiri oleh semua Kepala Desa/Lurah dan Kepala Puskesmas bahkan diforum-forum tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang selalu melakukan sosialisasi program JKRS. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, RSUD Kab. Rembang maupun di Rumah Sakit Rujukan Provinsi tidaklah sulit, semua masyarakat miskin Kabupaten Rembang yang telah masuk dalam SK Bupati tentang Kepesertaan Program JKRS cukup datang ke Puskesmas dengan menunjukkan KTP dan KK, masyarakat tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kab. Rembang/Rumah Sakit Rujukan Provinsi dilengkapi dengan Surat Rujukan.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
6.	<p>Dibidang Pengembangan Ekonomi Rembang (PER) kami sangat menghargai upaya-upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi kabupaten rembang dengan memperhatikan pada sektor pertanian di pedesaan, bantuan modal kepada UMKM. FP3 memintah lebih transparan dalam pemberian Hibah tersebut, jangan justru menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat karena APBD untuk kita semua bukan untuk golongan atau kelompok tertentu saja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Hibah kepada kelompok tani berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD beserta peraturan perubahannya (Permendagri Nomor 39 Tahun 2012) 2. Dalam memberikan Rekomendasi Dinas selalu mengadakan Verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Kelompok Tani baik secara administrasi maupun kegiatan dilapangan. Sehingga Kelompok Tani yang menerima Hibah betul-betul sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
IV. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1.	<p>Tempat Parkir Truck di Kecamatan Lasem sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terbukti truck-truck besar masih parkir di tepi jalan sepanjang Bonang Lasem, untuk apa anggaran sebesar itu kalau ternyata pembangunan parkir itu tidak tepat guna dari tujuan sernula?</p> <p>Aktifitas pembangunan untuk pengebruhan pelabuhan Umum Nasional di Desa Sendang Molyo, Sluke dilakukan tidak secara profesional, sehingga mengganggu pengguna jalan lain.</p>	<p>1 Tempat parkir truck di Desa Sendangasri Kecamatan Lasem sudah dioperasikan mulai tanggal 1 Nopember 2012, yang dibangun untuk landasan parkir baru 1/3 dari luas keseluruhan lahan yaitu 13.760m2 dengan daya tampung truck parkir + 70 kendaraan besar serta belum dilengkapi fasilitas-fasilitas lain. Sehingga belum mampu menampung truck-truck yang berhenti di wilayah Kabupaten Rembang. Sedangkan Kabupaten Rembang adalah merupakan titik leleh dalam mengemudi, sehingga banyak truck yang berhenti di wilayah Kabupaten Rembang dan banyak sopir truk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lasem. Pembangunan tempat parkir truk tersebut dilanjutkan tahun 2013 dan apabila sudah selesai 100% maka kami dan Instansi terkait akan berusaha semua truk-truk diusahakan masuk ke tempat parkir Sendangasri</p> <p>Kegiatan pengebruhan/pembangunan PUN Tanjung Barang di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sudah bertindak cerdas sebelum pelaksanaan kegiatan sudah direncanakan dengan baik sesuai pedoman analisis dampak lalu lintas, dilokasi tersebut sudah dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan, lampu warning light, trafic light dan ditempatkan petugas lalu lintas dari investor.</p>

RESEARCH REPORT ON THE ...

The first part of the report discusses the general situation of the ...

The second part of the report discusses the specific details of the ...

The third part of the report discusses the results of the ...

The fourth part of the report discusses the conclusions of the ...

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Rencana tahun 2013 sudah diusulkan dibangun jalur lima lajur dari Kementerian PU yang lengkap dengan pagar pemisah jalan, traffic light dan jalur lambat.</p>
2	<p>Pada Rancangan APBD Tahun 2013 Pembangunan jalan dan jembatan direncanakan anggaran sebesar + 38 milyar kami berharap hendaknya anggaran sebesar ini ada pemetaan yang jelas sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara kecamatan yang satu dengan yang lain dalam rangka mempermudah dan memperlancar akses Ekonomi</p>	<p>2. Terima kasih atas masukannya. Pemetaan penanganan jalan diprioritaskan pada perbaikan jalan kabupaten penghubung antar kecamatan yang rusak parah dan mempunyai nilai ekonomi dan nilai strategis yang tinggi. Kemudian dilanjutkan jalan poros antar desa yang mengakses pada jalan kabupaten/provinsi. Disamping itu jala-jalan lingkungan yang strategis akan ditangani guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Penanganan tetap mengacu pada pemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dapat merasakan dampak positif terhadap perbaikan jalan</p>
3	<p>Hibah kepada KONI sebesar 4,9 milyar apa tidak terlalu riskan jika dibandingkan ketika ada pelarangan dari Permendagri terkait dengan bantuan APBD untuk kegiatan olah raga?</p>	<p>3. Bahwa pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan telah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.</p> <p>Rencana hibah 4,9 milyar diperuntukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Sekretariat KONI 2. Pemusatan Latihan jangka panjang persiapan PORPROV Jawa Tengah tahun 2013 3. Pemusatan Latihan jangka pendek persiapan PORPROV Jawa Tengah tahun 2013 4. Pengiriman Kontingen Olah raga Kabupaten Rembang ke PORPROV Jawa Tengah tahun 2013 di Banyumas 5. Bantuan biaya pembinaan cabang olah raga se-Kabupaten Rembang Tahun 2013.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
4	<p>Di Tahun 2013 banyak Desa di Kabupaten Rembang yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, agar berjalan dengan lancar kami berharap supaya mempersiapkan Perangkat dan aturan secara baik. DPRD Kabupaten Rembang telah memberikan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Saudara Bupati bahwa Kepala Desa Bulu, Kecamatan Bulu Saudara Khoifin untuk diberhentikan sementara, dalam rangka menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa</p>	<p>4 Mensikapi persiapan pelaksanaan Pilkades tahun 2013 kami masih memakai aturan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2007. Sedangkan untuk persiapan Pilgub, Pileg dan Pilpres maupun Pilkades, kami adakan rapat koordinasi dengan semua SKPD, terkait dengan pelaksanaan dan pengajuan anggarannya termasuk didalamnya dari segi pengamanan.</p>

Name	Address
John Doe	123 Main St, New York, NY
Jane Smith	456 Elm St, Los Angeles, CA
Robert Johnson	789 Oak St, Chicago, IL
Mary White	101 Pine St, San Francisco, CA
David Brown	202 Cedar St, Boston, MA
Susan Green	303 Birch St, Philadelphia, PA
Michael Black	404 Spruce St, Washington, DC
Elizabeth Gray	505 Willow St, Miami, FL
James King	606 Ash St, Seattle, WA

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Kami menyambut baik atas ajuan Raperda APBD 2013 yang secara detail telah dimasukkan angka-angka hitam putih berupa dana-dana yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Jawa Tengah	<p>1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penganggaran DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang DAU. b. Alokasi DAK dapat dianggarkan sebagai pendapatan Daerah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013. c. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. <p>Maka dengan telah Turunnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-831/PK/2012, tanggal 24 Oktober 2012 dapat dicantumkan Alokasi DAU sebesar Rp. 640.273.360.000,- dan DAK sebesar Rp. 56.771.470.000,-. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 37.573.020.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 41.653.651.000,- yang didasarkan pada realisasi APBD Perubahan 2012. Untuk alokasi Dana penyesuaian dan Otsus belum dicantumkan karena belum adanya ketentuan resmi dari Pemerintah.</p> <p>Sedang alokasi Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya belum dialokasikan karena masih menunggu penetapan APBD Prop 2013.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
2.	Penjelasan Pendapatan pada APBD TA 2013	2. Bahwa sumber-sumber pendapatan daerah sudah kami sampaikan secara detail termasuk angka-angka riil PAD sebagaimana kami sampaikan dalam data keuangan Tahun Anggaran 2013, sedangkan yang belum bisa kami sampaikan khususnya untuk pendapatan lain-lain yang sah, karena belum ada penetapannya (Peraturan Gubernur/ Peraturan Menteri Keuangan). Sedangkan angka tersebut bisa kami masukkan dalam perubahan penjabaran Penjabaran APBD TA 2013, hal ini sesuai Permendagri no 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013.
3.	Kelanjutan Rekomendasi DPRD Kab Rembang terkait pemberhentian sementara atas Kepala Desa Bulu, Kecamatan Bulu	3. Kita sudah melakukan pembinaan dan tindakan kepada Kepala Desa yang memang bermasalah, khusus untuk desa Bulu sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan intern oleh inspektorat, dan hasil pemeriksaan tersebut akan kami jadikan dasar untuk pemberian sanksi kepada Kepala Desa Bulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pemberhentian sementara kepada Kepala Desa Bulu, sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2007, Pasal 39 disebutkan bahwa "Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat". Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB dan FBK
4.	Kartu JKRS bagi warga yang berhak diseluruh Kabupaten Rembang kapan diterbitkan dan didistribusikan	4. Kartu JKRS telah diterbitkan pada awal Bulan Tahun 2011 pada saat launching pertama kali program JKRS (hanya untuk maskin non Kuota Jamkesmas) sedangkan untuk tambahan peserta JKRS yang dilakukan setiap 6 bulan tidak diterbitkan kartu tetapi data tersebut berupa SK Bupati tentang Kepesertaan Tambahan JKRS telah dikirimkan baik tingkat desa dan semua pemberi pelayanan kesehatan (PPK 1, PPK 2 dan PPK 3).

No	PERTANYAAN	JAWABAN
5.	<p>Penataan dan pemantapan kinerja manajemen dari kecukupan alat kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang beserta seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang terkait akan dioperasionalkannya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS)</p>	<p>5. Terima kasih atas masukannya kami terus melakukan upaya pembenahan/perbaikan dan menambah kelengkapan sarana, prasarana dan SDM pelayanan sebagai antisipasi berlakunya BPJS</p> <p>Dinas Kesehatan Kabupateri Rembang dalam rangka implementasi UU BPJS telah melakukan sosialisasi kepada Kepala Puskesmas, Unsur Kecamatan dan Rumah Sakit tentang Rencana Diberlakukannya Undang-Undang BPJS yang akan diimplementasikan pada tanggal 01 Januari 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Prioritas Program dalam rangka penataan dan pemantapan atas kinerja manajemen dan kecukupan peralatan kesehatan ditahun 2013.</p>
6	<p>DAK pendidikan 32 milyar agar dilaksanakan dengan penuh integritas, akuntabel dan amanah.</p>	<p>6. Mengucapkan terimakasih atas masukannya dan akan melaksanakan dengan penuh integritas, akuntabel dan mengoptimalkan pengawasan dengan langsung ke lokasi sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini melalui mekanisme swakejola, sehingga pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh sekolah.</p> <p>Untuk SDN Kedungasem Kecamatan Sumber telah dilaksanakan perbaikan dengan konstruksi yang telah disesuaikan, sedangkan untuk SMPN 3 Satu Atap Sarang juga telah diperbaiki konstruksinya dan telah diselesaikan dengan Bantuan Block Grant, DAK yang bersumber dari dana APBN, maupun APBD Provinsi.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
7.	Terkait aktivitas pembangunan gedung dan tempat usaha/ produksi PT. Chaeron Pock Pand di Sedan dan Sendang Mulyo Guriem.	<p>7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana investasi PT. Chaeron Pock Pand meliputi wilayah di Desa Karangasem dan Desa Kedungringin Kecamatan Sedan seluas kurang lebih \pm 21,6 Ha. Sedangkan di Desa Sendangmulyo Kec. Guriem masih dalam tahap peninjauan. Sedangkan rencana usaha PT. Chaeron Pock Pand adalah di wilayah Desa Karangasem dan Desa Kedungringin Kecamatan Sedan adalah peternakan ayam dengan jenis kegiatan pembibitan ayam dan penetasan ayam. Secara prinsip telah sesuai dengan Perda No.14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. 2. Pada lahan lokasi peternakan ayam yang diizinkan berada di Desa Karangasem dan Desa Kedungringin Kecamatan Sedan termasuk kawasan peruntukan pertanian lahan kering. Dan sesuai ketentuan umum zonasi untuk pengaturan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (4) disebutkan antara lain yaitu lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor; kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas; dan pengembang pusat pengembangan pemasaran produk peternakan serta pengembangan sapi perah dan pasar agribisnis sektor peternakan, serta sesuai Pasal 27 ayat (3) huruf c bahwa kawasan peruntukan agroindustri meliputi antara lain kecamatan Sedan, sehingga kawasan ini ditetapkan kawasan industri menengah peruntukan agroindustri.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Terkait deliniasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dimana sampai dengan bulan Nopember 2012 masih dalam proses inventarisasi pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan Dintanhut Kabupaten Rembang untuk semua kawasan pertanian Kabupaten Rembang. Terkait calon lokasi usaha peternakan ayam tersebut merupakan lahan kering sehingga tidak masuk dalam LP2B. Dengan izin prinsip yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten atas rencana usaha peternakan ayam di Desa Karangasem dan Desa Kedungringin Kecamatan Sedan supaya terus dilaksanakan.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
VI. FRAKSI PAN		
1.	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terlebih pada sektor-sektor yang menjadi pundi-pundi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD	1. Dalam pelayanan terhadap masyarakat, terlebih pada sektor-sektor yang menjadi pundi-pundi dalam pengelolaan sumber – sumber PAD. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum selalu kami lakukan secara professional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta S O P (Standar operasional dan prosedur) yang ada termasuk diantaranya kepada para Wajib pajak dan Objek pajak.
2.	Perlu ditingkatkan system pembinaan dan pengawasan yang memadai untuk dana hibah dan bansos, sehingga tidak menjadikan kesempatan penyalahgunaan dana dari wilayah birokrasi ke masyarakat langsung.	2. Pembinaan dan pengawasan penerima Hibah/Bansos sudah kami lakukan dengan SKPD terkait dan untuk waktu mendatang akan lebih kami tingkatkan secara kualitas dan kuantitasnya.
3.	Perlu dikaji untuk mengalihkan beban pembiayaan asset menjadi biaya sewa sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Seperti anggaran pembelian mobil bias dialihkan menjadi biaya sewa mobil, demikian juga dengan asset lainnya	3. Akan kami lakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpegang pada prinsip kewajaran dan kepatutan baik secara legalitas dan ekonomis.
4.	Musim kemarau yang berkepanjangan ini, semakin mengingatkan kita pentingnya pembuatan embung, bendungan juga cekdam-cekdam untuk mengurangi volume air yang hilang. Masih banyak sungai-sungai yang dapat kita manfaatkan, tidak saja untuk kepentingan irigasi pertanian tetapi juga untuk air minum.	4. Penanganan Cekdam dan jaringan irigasi yang berkaitan dengan pemanfaatan beberapa sungai akan lebih dioptimalkan melalui program pembanguan embung dan pemeliharaan jaringan irigasi. Disamping penanganan yang didanai APBD Kab. Rembang, juga diusulkan pada APBD Propinsi maupun APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai. Sampai saat ini sudah ada beberapa normalisasi sungai, perbaikan embung, perbaikan bendungan yang sudah dilaksanakan melalui Bantuan Propinsi, Dinas PSDA Propinsi, maupun Balai Besar Wilayah Sungai.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI BINTANG KEADILAN	
1.	Sudah dua kali Sdr. Bupati tidak hadir dalam paripurna pembahasan APBD.	1. Terkait tidak hadirnya Bapak Bupati pada rapat-rapat paripurna pembahasan RAPBD TA. 2013, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penguatan visi Ekonomi dengan tema "Bersama Remaja Indonesia' Maju 2030", Bapak Bupati diundang oleh Bapak Presiden dan tidak boleh diwakili dan dihadiri oleh seluruh Pemangku Kepentingan yaitu Lembaga Negara, Para Menteri, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN serta Dunia Usaha.
2.	Keterlambatan penyampaian naskah RAPD kepada anggota DPRD, yang berimplikasi kepada sempitnya waktu pembahasan komisi dengan SKPD juga pembahasan di tingkat Fraksi.	2. Kami perhatikan dan akan kami upayakan pada tahun anggaran yang akan datang untuk lebih cepat sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.
3.	Asumsi PAD 2013 Rp. 108 Milyard, optimis dapat dicapai, bahkan semestinya lebih besar lagi.	3. PAD TA.2013 sebesar Rp. 108 Milyard telah direncanakan sesuai potensi yang ada, realistis dan terukur sedangkan yang disampaikan menguap di perjalanan saya nyatakan tidak ada karena pajak daerah telah dipungut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, disamping itu kami juga telah menempatkan beberapa petugas di pos-pos pemantauan di sepanjang perjalanan pengangkutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
4.	Data kepesertaan JKRS tidak disosialisasikan secara optimal, sehingga banyak warga masyarakat peserta JKRS yang tidak tahu kalau dirinya terdaftar sebagai peserta.	4. Data maskin peserta JKRS baik hard copy maupun soft copy telah didistribusikan ke Kecamatan, Puskesmas dan RSUD Kab. Rembang serta RS. Kariadi Kota Semarang, sedangkan untuk yang ke Desa sudah mendapatkan print out data kepesertaan JKRS. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Rembang melalui Camat, Kepala Puskesmas dan seluruh Kepala Desa.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Untuk data Kartu JKRS telah diterbitkan pada awal Bulan Tahun 2011 pada saat launching pertama kali program JKRS (hanya untuk maskin non Kuota Jamkesmas) sedangkan untuk tambahan peserta JKRS yang dilakukan setiap 6 bulan tidak diterbitkan kartu tetapi data tersebut berupa SK Bupati tentang Kepesertaan Tambahan JKRS telah dikirimkan baik tingkat desa dan semua pemberi pelayanan kesehatan (PPK 1, PPK 2 dan PPK 3)</p>
5.	<p>Terkait dengan banyak keluhan dari masyarakat akan banyaknya material bahan baku bangunan yang tidak berkualitas, agar dikenakan sanksi sebagaimana mestinya kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.</p>	<p>5. Keluhan masyarakat merupakan satu hal yang dapat membantu kami dalam pengawasan pekerjaan. Setiap ada keluhan segera kami melakukan tindakan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan agar memperoleh hasil yang berkualitas. Terhadap rekanan /penyedia jasa yang kurang taat terhadap ketentuan kualitas sudah kami kenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pembongkaran bangunan yang tidak berkualitas, peringatan keras, denda keterlambatan pelaksanaan dan bahkan sampai mengeluarkan daftar hitam (<i>black list</i>) pada penyedia jasa untuk tidak diperbolehkan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.</p>
6.	<p>Rencana Pemberian Hibah kepada KONI sebesar Rp. 4,9 Milyard dan kepada KOMISI D agar mencermati ini.</p>	<p>6. Lihat jawaban kami yang sudah ada pada Fraksi PKB.</p>
7.	<p>Atas dibentuknya BLH, agar segera dilakukan pengkajian yang mendalam dan cermat atas AMDAL setiap usaha bahan tambang, termasuk wacana pendirian pabrik semen.</p>	<p>7. Akan kami perhatikan</p>
8.	<p>Terkait keluhan Masyarakat atas pelayanan yang dilakukan sebagian oknum Kepala Desa, khususnya di desa Bulu, agar kepada yang bersangkutan dilakukan pembinaan dan tindakan sebagaimana mestinya.</p>	<p>8. Lihat jawaban kami yang sudah ada pada Fraksi PDI P.</p>

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

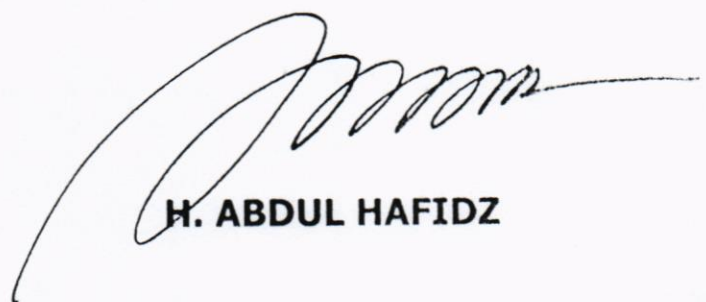
Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 14 November 2012

WAKIL BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ

**TAMBAHAN JAWABAN BUPATI REMBANG ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. REMBANG DALAM RANGKA MEMBAHAS
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2013 PADA SIDANG PARIPURNA
TANGGAL 14 NOVEMBER 2012**

Jawaban untuk Fraksi Bintang Keadilan Poin 1 dan 3

Poin 1

Terimakasih Fraksi Bintang Keadilan ternyata ini ada dampaknya. Kalau yang ada Wakil Bupati pasti banyak yang tidak hadir, ini juga kami rasakan, tapi tidak apa-apa. Ini pada Sekda harus menegur pada bawahannya, disini saya bukan Wakil Bupati tetapi Mewakili Bupati.

Poin 3

Kalau masih kurang jelas, silahkan Saudara Anggota DPRD untuk ikut kesana.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esac memberi bimbingan dan petunjuk- Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Rembang, 14 November 2012
Wakil Bupati Rembang

Ttd

H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN 2013

**RABU , 14 NOPEMBER 2012
DIBACAKAN OLEH : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati , Wakil Bupati .
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
3. Saudara Ketua pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Rembang.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang .
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum kami terhadap Raperda APBD tahun 2013 ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya, kita masih diberi Kesehatan, kenikmatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti Paripurna pada hari ini.

Sebelumnya dalam kesempatan yang baik ini, ijinkalah fraksi kami mengucapkan "Ahlan Wasahlan Bihudlurikum" Selamat datang kepada jama'ah Haji Kabupaten Rembang, selamat bertemu kembali dengan keluarga, teriring Do'a semoga menjadi Haji yang Mabruur.

Amin amin amin Ya Robbal Alamin.

Bupati, Wakil Bupati dan Hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah bekerja keras membangun dan mengejar ketertinggalan, sehingga menjadikan Rembang sejajar dengan daerah lain.

Dilihat dari penyampaian RAPBD tahun 2013 kami melihat ada kenaikan PAD yang luar biasa yaitu sebesar Rp. 12.970.738.200,00 dibandingkan dengan APBD Tahun 2012.

Kami berharap dengan kenaikan ini tidak memberatkan masyarakat Kabupaten Rembang tetapi berkat kerja keras Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Tidak demikian sebaliknya mengapa justru dana DAK mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp. 21.579.190.000,00. Apakah disebabkan kurangnya penyerapan Anggaran di tahun sebelumnya atau laporannya yang kurang baik (tepat waktu) atau ada hal-hal lain.

Bupati, dan Wakil Bupati Hadirin yang Berbahagia.

Dalam kesempatan yang baik ini pula ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami anjurkan sebagai bahan masukan demi kebaikan dimasa yang akan datang :

1. Mengenai pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata sampai ke desa -desa dimana masih ditemukan Balita yang menderita Gizi Buruk sampai ada yang meninggal dunia Untuk itu kami mohon kepada Dinas terkait agar lebih sering turun ke lapangan.

Pelayanan masih kurang memuaskan terutama yang memiliki jamkesmas berbeda dengan yang membayar biasa.

2. Pedagang yang ada dipasar Rembang Kota khususnya yang memakai badan jalan supaya ditata kembali karena setiap pagi terjadi kesemrawutan dan tidak nyaman untuk berbelanja.

3. Agar supaya lampu penerangan di daerah perbatasan (Sarang - Kaliori) segera direaliasai.

Khusus untuk jalur alternatif supaya dipasang rambu-rambu bila ada kemacetan dipantura.

Mengenai parkir truk-truk besar yang parkir dibahu jalan mulai lasem sampai Kaliori sangat mengganggu pengguna jalan lain terutama disekitar SPBU Tireman

4. Mohon sering diadakan operasi siswa yang membolos yang selalu nongkrong diwarung- warung kopi .
5. jalan akses tengah dan timur masuk ke PPI Tasikagung supaya dilebarkan dan diadakan perbaikan.
6. Dengan perencanaan Anggaran Induk 2012 dibidang Bina Marga dimohon dibuat prioritas untuk memperbaiki jalan yang rusak parah terlebih dahulu .

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih

ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap tamu undangan
kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


KETUA

H. HARNO, SE



SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, SE.

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN REMBANG



Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2013



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012
Juru Bicara : SUCI RAHAYU, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kali ini, perkenankanlah kami, Fraksi Partai GOLKAR mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Partai GOLKAR akan menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang hari Selasa 13 Nopember 2012 kemarin, sbb.

- Pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang Th 2013 kali ini mengulangi kesalahan pembahasan RAPBD setahun yang lalu yakni terkesan tergesa-gesa. Hal ini akan menyulitkan pembahasan RAPBD antara Komisi-komisi DPRD dengan SKPD

terkait, jadwal pembahasan sangat padat dan hasilnya akan kurang optimal. Semoga proses pembahasan RAPBD ini ibarat “jalmo limpad seprapat tammatt” artinya orang yang cerdas dan faham itu bekerja dengan cepat namun hasilnya sempurna. Untuk menyikapinya kami minta RKA SKPD tersaji sebelum pembahasan dimulai. Fraksi Partai GOLKAR mempunyai semboyan “*lebih cepat.... lebih baik....*”.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan daerah, PAD sangat berperan dalam merealisasikan program pembangunan daerah. Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang atas peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam RAPBD tahun 2013 ini sebesar 12 % dibanding APBD tahun 2012 ini. Namun kami mengamati, sumber PAD ini masih didominasi dari Pajak Daerah, padahal masih banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang masih bisa ditingkatkan pemasukannya. Misalnya pendapatan yang berasal dari asset yang dipisahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah, kami melihat penerimaan deviden dari BUMD belum sebanding dengan penyertaan modal yang digelontorkan.
- Fraksi Partai GOLKAR mengamati, pendapatan daerah dari sektor pertambangan/galian gol. C belum sepadan dengan kerusakan infrastruktur maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi. Untuk itu kami menghimbau agar target pemasukan dari sektor pertambangan lebih ditingkatkan lagi, disamping itu perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi atas kerusakan lingkungan juga digiatkan.
- Mengenai pelayanan BLUD Rumah Sakit “Dr Soetrasno” Rembang sudah lebih baik, kami menghimbau agar senantiasa meningkatkan pelayanan dan kenyamanan terhadap pasien yang berobat disana, hingga pada saatnya nanti menjadi pelayan yang baik bagi kita semua. Namun untuk kesekian kalinya kami minta agar BLUD RS. “Dr. Soetrasno” memerintahkan kepada Pengelola

Parkir/Penitipan Kendaraan untuk dibuatkan ~~dibuatkan~~ peneduh. Jangan hanya mengejar uang parkir tanpa memberi pelayanan yang baik pada masyarakat. Pengunjung dengan sadar sudah mau membayar ongkos penitipan, sebagai imbal baliknya pengelola tempat penitipan harus bisa memberi jaminan sepeda motor aman dan tidak terjadi kerusakan.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Fraksi Partai GOLKAR sependapat dengan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Jangan hanya sekedar mendapat predikat atau mendapat piagam penghargaan tapi ternyata pelayanan kepada masyarakat tidak meningkat. Kami tidak sependapat bila predikat WTP atau piagam penghargaan yang lain itu sekedar pencitraan saja.

Saudara pimpinan sidang dan para hadirin sekalian.

Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini kami ingin mengingatkan bahwa semua yang hadir di ruangan ini adalah pemimpin, pemuka masyarakat. Perkenankanlah kami mengutip pesan Prabu Yudhistira ketika mewisuda Raden Parikesit sebagai penerus Kerajaan Amarta yang kemudian disebut sebagai ajaran 3 H (telu ha). Konsep "3 ha" tersebut adalah "hamong, hamot lan hamemangkat"

1. Hamong, seorang pemimpin/raja harus sanggup berperan sebagai pamomong yaitu orang yang melayani bukan seorang yang selalu minta dilayani. Sebagai abdi masyarakat menuntut sikap mudah mencela.
2. Hamot, berarti mampu menerima (amot / mewedahi) semua hal yang didengar atau disampaikan oleh orang lain, mendengarkan keluhan dan aspirasi dari rakyat
3. Hamemangkat, menjaga derajat dan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin / raja harus menjaga martabat pribadi dan negara dengan menjaga tingkah

laku yang baik dan menjadi panutan dan suri tauladan bagi rakyatnya.

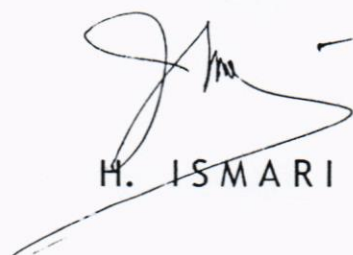
Semakin kuat struktur pemerintahan dan sistem kepemimpinannya, maka semakin tidak tampak kekuasaan seorang pemimpin. Ia menjalankan dan mengelola negara dengan sistem tata negara dan perundang-undangan yang baik, sehingga fungsi pemerintahan berjalan baik. Keberhasilan kepemimpinan dari kekuasaan seorang pemimpin/raja terukur dari kesejahteraan bagi negara dan rakyatnya. Kami memandang, hal inilah salah satu titik lemah dari pemerintahan kita saat ini. Maka dari itu, kita harus bisa lebih aspiratif serta lebih peka terhadap apa yang disuarakan oleh masyarakat Rembang dan lebih ber-orientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Rembang.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua,


H. ISMARI



Sekretaris,


DJOKO SOESILO



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP**

**RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : RABU
TANGGAL : 14 NOPEMBER 2012

Dibacakan oleh : H. YUDIYANTO, SH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : RABU
TANGGAL : 14 NOPEMBER 2012
Dibacakan oleh : H. YUDIYANTO, SH

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Alhamduillahi robbil'alamin, Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menjadikan kita termasuk golongan hamba-Nya yang senantiasa mendapat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita bersama dapat bertemu untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2013. Besar harapan kami bahwa melalui forum kali ini mampu menjadi sarana untuk mewujudkan kepedulian kita atas upaya-upaya pembangunan demi kesejahteraan masyarakat kabupaten Rembang pada umumnya. Karena penyusunan APBD ini merupakan bagian yang esensi dari proses panjang pembangunan di suatu Daerah.

Sholawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Akhir zaman, Nabi yang tiada lagi Nabi setelahnya, Nabi yang pada dirinya terdapat tauladan yang baik; Nabi yang padanya kita harapkan syafaat; beliau adalah Nabi Muhammad SAW.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang termat,

Bahwa Pembangunan di suatu daerah merupakan tanggung jawab bersama dari dan oleh masyarakat di suatu daerah tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. RAPBD kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini merupakan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama di bidang anggaran, maka **transparansi** adalah kata kunci dari usaha penciptaan pemerintahan yang bersih. RKA dari masing-masing SKPD harus jelas, besarnya anggaran, sasaran, maksud dan tujuan dari setiap program yang direncanakan.

Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp. 108.012.530.000.00 dibanding perubahan APBD tahun 2012 sebesar Rp. 95.041.791.800; berarti ada kenaikan sebesar Rp. 12.970.738.200. FP3 menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka kenaikan PAD tersebut, akan tetapi terbersit pertanyaan dari kami seberapa besar deviden dari perusahaan-perusahaan daerah yakni : PD. Bank Pasar, PD BPR BKK Lasem, PDAM, PT. RBSJ dan yang lain ? apalagi pada tahun anggaran 2013 terdapat Penyertaan Modal sebesar Rp. 5.200.000.000; untuk PD. Bank Pasar sebesar Rp. 3,5 milyar, PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp. 1 milyar dan PDAM sebesar Rp. 700.000.000; jadi sesuatu yang niscaya adanya bagi hasil/deviden yang meningkat pula bagi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Rembang tercinta ini.

FP3 berharap besar terhadap perusahaan-perusahaan milik pemerintah kabupaten Rembang untuk dapat mendongkrak PAD kabupaten Rembang. FP3 tidak keberapatan terkait dengan "suntikan" penyertaan modal Bagi perusahaan-perusahaan daerah yang ada, selama pembagian devidennya jelas, bahkan lebih dari itu FP3 mengharap bahwa perusahaan-perusahaan daerah tersebut dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Bahwa Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2013 ini dalam rangka pencapaian visi misi antara lain adalah adanya Program Sekolah Gratis yang bermutu yang menjadi salah satu empat pilar pokok pembangunan di kabupaten Rembang, FP3 dan masyarakat pada umumnya sangat memberikan apresiasi positif terhadap program tersebut, termasuk penyediaan beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK negeri maupun swasta dari keluarga kurang mampu serta hibah kepada SMP/MTs/SMA/MA/SMK swasta.

Sebagaimana kita tahu dalam penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi hal ini **janganlah menjadikan sebab "sulitnya" memproses pencairan dana hibah** tersebut bagi penerimanya, atau mungkinkah karena kurangnya sosialisasi terkait hal tersebut ?

Masih dibidang pendidikan, bahwa kita telah memiliki peraturan daerah tentang pendidikan, sejauhmana perda ini di berlakukan?

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Dibidang Kesehatan, sebagai salah satu dari empat pilar program pemerintah kabupaten Rembang, FP3 melihat bahwa pelayanan kesehatan sudah makin membaik, tetapi sayang, FP3 masih melihat adanya keengganan masyarakat menggunakan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS), ini sebabkan antara lain : proses administrasi yang masih dirasa sulit dan juga ada kekhawatiran bagi sebagian masyarakat bahwa pasien yang menggunakan program JKRS tidak/kurang dilayani dengan baik. FP3 meminta agar sosialisasi terkait dengan hal tersebut lebih ditingkatkan sehingga ada pemahaman masyarakat bahwa pengguna Program JKRS itu sebenarnya tidak gratis, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten melalui program JKRS.

Dibidang Pengembangan Ekonomi Rembang (PER), kami sangat menghargai upaya-upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi kabupaten Rembang dengan memperhatikan pada sektor pertanian di pedesaan, bantuan modal kepada UMKM, FP3 meminta untuk lebih transparan dalam pemberian hibah tersebut, jangan justru menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. karena APBD untuk kita semua bukan untuk golongan atau kelompok tertentu saja.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami sampaikan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dari hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 14 Nopember 2012

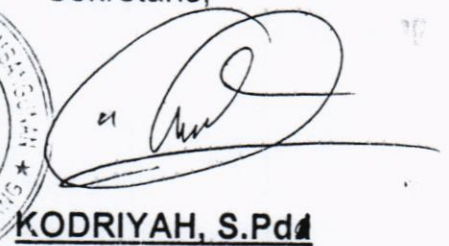
Fraksi PPP,

Ketua,


A.SAKDLLAH

Sekretaris,




KODRIYAH, S.Pd



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013

disampaikan oleh pudji Santoso, SP.

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Rabu, 14 Nopember 2012

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati, Forum Pimpinan Daerah, Komandan Kodim Rembang, Kepala Polres Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan Ketua Pengadilan Agama Rembang.

Yang Kami Hormati, saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Para Carnat.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemberi Rahmad atas segala nikmat yang telah kita nikmati bersama. Salah satu nikmat tersebut adalah kehadiran kita bersama dalam rapat paripurna di gedung DPRD ini. Tanpa ada aral suatu apa pun

Selamat tahun baru Hijriyah, semoga peralihan tahun ini yang jatuh pada besok pagi mampu menjadi tonggak baru perubahan setelah kita semua melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap sikap, perbuatan, perkataan dan kebijakan pada tahun 1433 Hijriyah. Semoga kita mampu mengambil hal-hal yang memberi manfaat serta meninggalkan hal-hal yang memberikan mudlorot dan semoga Tahun Baru nanti lebih baik dari tahun kemarin. Amiin

Mengawali Pemandangan Umum ini kami dari FPKB Mengapresiasi dan sekaligus memberikan Penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal Pelayanan yang baik pada Masyarakat

Rembang secara Umum termasuk Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Pelayanan Pembuatan KTP walau kadang-kadang ada sebagian Masyarakat yang dalam membuat KTP masih harus mondar mandir/ bolak balek Kekantor Kecamatan disebabkan Persediaan Blangko yang kurang dan kami berharap tidak nanya baik pada upaya perbaikan fisik/rehap Gedong bongkar pasang Gedung Sekolah dsb akan tetapi juga diimbangi dengan adanya peningkatan Kualitas dan Pendidikan

Dalam Pemandangan Umum ini, kami FPKB tidak bias memberikan komentar banyak sebab sampai Pemandangan Umum ini di buat kami belum mengetahui gambaran kongritnya APBD Tahun 2013. Naaah....? Siapakah yang salah RAPBD yang masuk pada Tanggal 2 Oktober 2012 ternyata sampai hari ini baru bisa di Paripurnakan? Kami FPKB hanya bisa memberikan catatan pada beberapa hal :

1. Pada Dinas Perhubungan

- Tempat Parkir Truck di Kecamatan lasem sampai hari ini belum bisa di manfaatkan secara Maksimal, hal ini terbukti Truck-truck besar masih saja parker di tepi jalan dimana- mana ? sepanjang Jalan Bonang Lasem. Yang menjadi pertanyaan kami adalah Untuk apa Anggaran sebesar itu kalau ternyata Pembangunan parkir itu tidak tepat guna dari tujuan semula? Mohon Pemkab jelaskan.
- Dengan Aktifitas Pembangunan untuk Pengebrukan Pelabuhan Umum Nasional di Desa Sendang Mulyo, Sluke dilakukan tidak secara Profesional, mengingat dalam Pelaksanaan Pengangkutan Hasil Tambang selalu Mengganggu Pengguna jalan di jalur Pantura, mestinya oleh Dinas Perhubungan masalah ketertiban ini bias diatur secara baik dan rapi, kalau Dinas Perhubungan itu Cerdas.

2. Pada Dinas Pekerjaan Umum.

- Pada Rancangan APBD Tahun 2013 Pembangunan Jalan dan Jembatan di Proyeksikan/direncanakan Anggaran sebesar + 38milyar kami berharap hendaknya Anggaran yang sebesar ini ada pemetaan yang jelas terkait dengan beberapa jalan yang sudah rusak parah sehingga ada pemerataan Pembangunan jalan secara menyeluruh biar tidak menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial antara Kecamatan yang satu dengan Kecamatan lainnya. Dalam rangka untuk memper mudah dan memperlancar akses Ekonomi.

3. Kami FPKB mempertanyakan adanya Hibah pada KONI sebesar 4,9 milyar. Kami kira angka ini terlalu besar sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan : apa Urgersinya? Apakah Anggaran sebesar ini tidak terlalu riskan jika dibandingkan ketika ada perlarangan dari PerMendagri terkait dengan bantuan APDB untuk kegiatan olah raga?

4. Bagian Pemerintahan :

- Di Tahun 2013 ini diwilayah Pemerintahan Kabupaten Rembang akan banyak desa yang mau melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, agar Supaya Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang berjalan dengan baik dan lancar Maka kami berharap pada Saudara Bupati supaya Mempersiapkan Perangkat dan aturan secara baik, mengingat Tahun 2013 adalah Tahun Serba Panas yaitu Tahun Pemilihan Gubernur, Tahun Menjelang Pemilihan Legislatif dan Tahun menghadapi Pemilihan Kepala Daerah.
- DPRD Kabupaten Rembang telah memberikan Rekomendasi yang telah disampaikan kepada saudara Bupati bahwa Kepala Desa Bulu, Kecamatan Bulu Saudara Khoifin Untuk diberentikan Sementara, sampai dimana cerita dan nasib Surat rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang tersebut? Dalam rangka menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di perlukan sekali adanya Sinergitas kinerja yang baik antara Eksekuti, Legislatif dan Yudikatif dalam kerangka menjunjung tinggi Prosedur Hukum.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan dengan berbagai kekurangan dan sekaligus Kritik hanya untuk perbaikan kinerja kita dimasa-masa yang akan datang. Tak ada gading yang tak retak dan tiada manusia yang sempurna.

Wallahul muwafiq ilaa aq wamittorieq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 14 Nopember 2012

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Muhammad Asnawi, S.Pd.I
Ketua

Puji Santoso, S.P.MH
Sekretaris





**Pemandangan Umum
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**Dibacakan Oleh,
SUPRIHADI**

**PADA SIDANG PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
RABO, 14 NOVEMBER 2012**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
MERDEKA...!!!**

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yang terhormat, Saudara Ketua beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan dan Saudara-Saudaraku Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang terhormat, Saudaraku yang tergabung dalam Forum Koordinasi Daerah.

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Saudara Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta Saudaraku-Saudaraku Camat se-Kabupaten Rembang;

Hadirin, Peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang berbahagia

Mengawali Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 ini, marilah kita selalu bersyukur ke hadirat Ilahi Robbi, atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga di pagi ini, kita semua dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari semoga dibawah lindungan dan petunjukNya.

Hadirin Sidang Paripurna yang Berbahagia

Sehubungan dengan diajukannya Raperda dimaksud, perkenankanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Kami menyambut baik atas ajuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2013 yang secara detail telah dimasukkan angka-angka hitam putih berupa dana-dana yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah yakni Dana Perimbangan DAU dan DAK sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012.

2. Kami meminta penjelasan detail kepada Eksekutif terhadap semua sumber dana dan besarnya yang masuk sebagai pendapatan ke APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 termasuk angka riil Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak ada lagi Anggaran diluar APBD Kabupaten Rembang.
3. Guna meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa kami mendesak ada peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan umum kepada masyarakat, dan guna menegakkan kembali simbol-simbol Pemerintahan Daerah diantaranya Camat, Bagian Tata Pemerintahan, Sekda dan DPRD. Kami perlu tanyakan sejauhmana Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang kepada Saudara Bupati terkait dengan perlu segera dilakukan pemberhentian sementara atas Kepala Desa Bulu Kecamatan Bulu dijalankan..???

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Hormati

4. Guna mewujudkan kenyamanan warga dan menjamin kepastian warga yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dari Pemkab Rembang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang, mempertanyakan kepada eksekutif, kapan diterbitkan dan didistribusikan Kartu JKRS bagi warga yang berhak di seluruh warga Kabupaten Rembang..???
5. Sehubungan dengan akan dioperasionalkannya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) oleh Pemerintah, Kami mendorong agar segera dilakukan evaluasi, penataan dan pematapan atas kinerja manajemen dan kecukupan peralatan kesehatan di RSUD dr. Soetrasno Rembang beserta seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 ini, ditemukan beberapa mata anggaran dengan angka-angka yang cukup fantastis diantaranya sekitar tiga puluh dua milyar untuk DAK Pendidikan, sehingga kami meminta agar para pelaksana melaksanakannya dengan penuh integritas dan akuntabel serta amanah, para pengawas dan para perencana hendaknya melakukan perencanaan dan pengawasan yang sebenarnya dengan langsung turun ke obyek secara istiqomah. Jangan sampai ambruknya atap SDN Jasem Kecamatan Sumber karena konstruksi penyangga yang dibawah standart terulang di tahun 2013 nanti dan cukup sampai di SMPN3 Satu Atap Sarang saja atap ambruk karena konstruksi bangunan yang tidak semestinya, padahal pembangunan yang dilakukan ibarat embun pagi yang belum sirna dari terpaan sinar matahari.

7. Seiring dengan aktivitas pembangunan gedung tempat usaha/produksi PT.Charoen Pock Pand yang sedang dilakukan dan kabar yang kami terima dari warga Karangasem Kecamatan Sedan dan warga Sendangmulyo Kecamatan Gunem. Terkait dengan hal dimaksud kami perlu meminta penjelasan:

- 7.1. Akan melakukan aktivitas apakah PT.Charoen Pock Pand di dua kecamatan dimaksud.???
- 7.2. Apakah kedua wilayah tersebut masuk dalam kawasan perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah.???
- 7.3. Bagaimana dengan ketentuan yang mewajibkan adanya tanah pengganti atas lahan berkelanjutan yang dipergunakan sebagai areal pabrik dimaksud.???

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang dibuat, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh
MERDEKA...!!!

Rembang, 14 November 2012


FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


JASMANI



SEKRETARIS,


SUMARSIH



PEMANGGAPAN UMUM
TERHADAPAN
DAPERDA AND I

14 NOVEMBER 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM AKHIR FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA APBD T.A 2013

Dibacakan Oleh : MOH. IMAM ZARKASI

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2013 dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang konsisten mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Mengulang pendapat kami pada APBD Perubahan T.A 2012, kami mendukung upaya pemerintah melakukan perkuatan ekonomi bagi masyarakat kecil dan menengah, guna

mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya perekonomian Kabupaten Rembang. Termasuk di dalamnya adalah perkuatan pasar tradisional dalam menghadapi invasi pasar-pasar modern. Alokasi dana untuk peningkatan fasilitas dan pemeliharaan pasar akan memberikan rasa nyaman bagi pedagang ataupun konsumen untuk *nguri-uri* pasar tradisional. Tidak kalah pentingnya adalah alokasi dana untuk jasa asuransi dapat memberikan proteksi terhadap investasi para pedagang pasar tradisional.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2013, kami masih melihat pentingnya :

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terlebih pada sektor-sektor yang menjadi pundi-pundi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD.
2. Perlu ditingkatkan sistem pembinaan dan pengawasan yang memadai untuk dana Hibah dan Bansos, sehingga tidak menjadikan kesempatan penyalahgunaan dana dari wilayah birokrasi ke masyarakat langsung.
3. Perlu dikaji untuk mengalihkan beban pembelian asset menjadi biaya sewa, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Seperti anggaran pembelian mobil bisa dialihkan menjadi biaya sewa mobil, demikian juga dengan asset lainnya.
4. Musim kemarau yang berkepanjangan ini, semakin mengingatkan kita pentingnya pembuatan embung, bendungan juga cekdam-cekdam untuk mengurangi volume air yang hilang. Masih banyak sungai-sungai yang dapat kita manfaatkan, tidak saja untuk kepentingan irigasi pertanian tetapi juga untuk air minum.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2013 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 14 November 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.



Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN
TERHADAP
RAPERDA APBD 2013**



REMBANG , 14 NOPEMBER 2012

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**



REMBANG , 14 NOPEMBER 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.38 Rembang (0295) 691194
Kode Pos 59251**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Rabu , 14 Nopember 2012

Dibacakan oleh : dr.ROCHMAD ISNAINI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati, Pimpinan DPRD , Komisi , Fraksi dan Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Dan seluruh jajarannya ;

Yang kami hormati. Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang
berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami
cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian
untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan hidayahNYA kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam
rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun
Anggaran 2013.

Tidak lupa dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari Pahlawan, dan marilah kita jadikan momen ini sebagai sarana menggugah bakti kita kepada Bangsa dan Negara dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana mestinya. Kepada segenab umat Muslim kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah 1 Muharam 1434 H, marilah tahun baru ini kita awali dengan amal yang lebih baik dengan harapan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tak lupa pula kami mengucapkan **Ahlan Wasahlan** (Selamat datang) Kepada seluruh Jama'ah Haji semoga menjadi haji yang mab'rur.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati ,

Mencermati Pemaparan Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Rembang tahun 2013 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati , FBK menyampaikan Pandangan Umum Sebagai berikut :

1. FBK mencatat sudah dua kali Sdr Bupati tidak hadir dalam paripurna pembahasan APBD dengan berbagai alasan, kita berharap catatan ini tidak bertambah lagi di masa mendatang sebagai bukti komitmen bersama untuk menghasilkan perda APBD yang berkualitas.

2. Secara umum kami mengapresiasi atas substansi RAPBD yang telah disusun dan dipaparkan. Namun demikian atas keterlambatan penyampaian naskah RAPBD kepada segenab anggota DPRD, yang berimplikasi kepada sempitnya waktu pembahasan KOMISI dengan SKPD juga pembahasan di tingkat Fraksi , bahkan hingga saat ini naskah RAPBD belum sampai kepada anggota,hal ini dapat berdampak pada kualitas pembahasan yang dilakukan, untuk itu FBK meminta penjelasan akan hal ini.

3. Mencermati asumsi PAD 2013 Rp 108M , FBK optimis hal itu dapat dicapai, bahkan semestinya lebih besar lagi mengingat banyak redistribusi pertambangan yang menguap diperjalanan.

4. FBK mengapresiasi komitmen terhadap anggaran JKRS 10 M., namun demikian kita menemukan dilapangan bahwa banyak warga masyarakat peserta JKRS yang tidak tahu kalau dirinya terdaftar sebagai peserta dikarenakan data kepesertaan JKRS tidak disosialisasikan optimal, (cukup disimpan di PUSKESMAS). Untuk itu FBK merekomendasikan agar dilakukan pencetakan kartu JKRS guna mengoptimalkan program ini.

5. Berkenaan naiknya anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang signifikan, FBK sependapat namun atas banyaknya keluhan dari masyarakat akan banyaknya material bahan baku bangunan yang tidak berkualitas, kami prihatin dengan hal ini. Kepada para rekanan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, kami merekomendasikan agar dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

6. FBK meminta penjelasan atas Rencana pemberian Hibah kepada KONI yang mencapai 4,9 M, dan kepada KOMISI D agar mencermati hal ini.

7. Atas sudah dibentuknya BLH, kami mengharapkan agar BLH segera melakukan pengkajian yang mendalam dan cermat atas AMDAL dalam setiap usaha explorasi bahan tambang, termasuk wacana pendirian pabrik semen.

8. Mensikapi keluhan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan sebagian oknum kepala desa, khususnya di desa Bulu, FBK merekomendasikan agar kepada yang bersangkutan dilakukan pembinaan dan tindakan sebagaimana mestinya.

9. Divisi N83 SD. Bagaimana pelaksanaannya?

Demikian pandangan umum terhadap RAPBD Kabupaten Rembang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maturnuwun.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang, 14 Nopember 2012

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua

Sekretaris

(dr.ROCHMAD ISNAINI)

(MUNTHOHID, SH)

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD III KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS

RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Hari : JUMAT
Tanggal : 30 November 2012
Waktu : Pkl. 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Pengesahan Rancangan Prolegda Tahun 2013;
 3. Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun 2013;
 4. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun 2013 ;
 5. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda APBD Tahun 2013;
 6. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Tahun 2013;

7. Pendapat Akhir Bupati Rembang atas Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 2013;
8. Skors ;
9. Penjelasan Pengusul (Komisi B) terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
10. Penyampaian Kajian Badan Legislasi Daerah terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
11. Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
12. Jawaban dari Pengusul (Komisi B)
13. Pengambilan Persetujuan terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang ;
14. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 7 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 1 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)**

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati Rembang.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Para Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur pada Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah memberi kita hidayah, ni'mah dan rahmah, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat, kesemuanya itu tidak lepas dari kekuasaan dan kemurahan Allah. Maka sebagai bangsa yang beragama dan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT tentu tidak henti-hentinya memanjatkan do'a , semoga setiap aktifitas dan langkah kita sehari-hari selalu dalam lindungan dan ridloNya, serta selalu mendapatkan berkah dan bermanfaat. Amin.

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok perlu saya sampaikan bahwa dinamika masyarakat Rembang selama bulan Nopember 2012 ini ada beberapa event yang dapat saya apresiasi antara lain :

1. Kepada rombongan Jamaah Haji Kabupaten Rembang yang telah tiba dengan selamat ditang air dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima yang sangat didambakan dan bisa dilaksanakan oleh seluruh Umat Muslim diseluruh dunia, kami ucapkan Selamat datang dan semoga menjadi Haji Mabrur...*Amin, Amin Ya Robbal Alamin.*
2. Tanggal 25 Nopember 2012 telah diperingati hari PGRI yang ke 38 dimana guru sebagai abdi negara di bidang pendidikan dan merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdikan dirinya selama 38 tahun dengan penuh dedikasi, semoga kedepan PGRI lebih bisa memberikan kontribusinya terhadap generasi muda bangsa Indonesia, khususnya generasi muda Rembang sebagai generasi penerus yang berdaya guna tinggi bagi bangsa dan Negara. Karena kesejahteraan guru semakin lama semakin baik dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu.
3. Tanggal 29 Nopember 2012 yang lalu telah diperingati hari KORPRI yang ke-41 dan telah dilaksanakan upacara, dengan diperingati hari KORPRI semoga seluruh Anggota Korp Pegawai Republik Indonesia bisa lebih aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga Anggota KORPRI benar – benar bisa berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Selanjutnya pada hari ini, dengan kekuasaan dan kemurahanNya pula, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna III (ketiga) DPRD Kabupaten Rembang dalam acara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Menurut catatan dari petugas Sekretariat DPRD, bahwa jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 42 orang.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD, maka dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Dengan demikian maka Rapat Paripurna dapat kita mulai, dan dengan mengucap "*Bismillaahirrohmaanirrohim*" tepat pukul 10.40 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 12 Nopember 2012, yang mengagendakan penjadwalan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013, maka agenda pokok Rapat Paripurna III (ketiga) hari ini adalah "*Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013*"

Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana tersurat dalam Bab III, Bagian Ketiga, Pasal 12 dan 13, yang intinya bahwa *Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun*

sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda dan hasilnya disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Berkenaan dengan hal itu maka berdasarkan Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 12 November 2012 dan tanggal 29 November 2012 dan Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/3361/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Pengiriman Prolegda Tahun 2013 yang ditindak lanjuti dengan Rapat Balegda DPRD Kabupaten Rembang bersama dengan Tim Prolegda Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 14 November 2012 telah dihasilkan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2013 yang fotocopynya telah berada pada tangan Saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang semua.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas maka dalam Rapat Paripurna hari ini merupakan penggabungan antara hasil Rapat Banmus tanggal 12 November 2012 dan 29 November 2012, sehingga agenda pokok Rapat Paripurna hari ini adalah ***Pengesahan Prolegda Tahun 2013, Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Tahun 2013 dan Pengambilan Persetujuan terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang,*** sehingga susunan acara selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengesahan Rancangan Prolegda Tahun 2013;
3. Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun 2013;

4. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun 2013 ;
5. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda APBD Tahun 2013;
6. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Tahun 2013;
7. Pendapat Akhir Bupati Rembang atas Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 2013;
8. Skors ;
9. Penjelasan Pengusul (Komisi B) terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
10. Penyampaian Kajian Badan Legislasi Daerah terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
11. Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
12. Jawaban dari Pengusul (Komisi B)
13. Pengambilan Persetujuan terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang ;
14. Penutup.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu "Pengesahan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2013". Sebagaimana telah saya kemukakan didepan, bahwa Hasil Penyusunan Prolegda

antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Untuk itu sesuai dengan Rancangan Prolegda yang copynya telah berada pada Saudara Anggota DPRD semuanya, saya mintakan persetujuan dari semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

“ Apakah Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2013 dapat disetujui dan disahkan menjadi Prolegda Tahun 2013 ?”

===== setujuuu!!! =====

(Ketuk Palu 1 Kali)

Terima kasih. Dengan demikian Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2013 hasil pembahasan antara Balegda DPRD Kabupaten Rembang dengan Tim Prolegda Pemkab Rembang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Prolegda Tahun 2013, dan akan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya yaitu Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun 2013 yang akan dibacakan oleh Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang, dan mohon kepada peserta rapat untuk mendengarkan dan mencermatinya. Kepada Saudara Drs. Achmad Mu'alif dipersilakan.

=====PEMBACAAN LAPORAN BANGGAR=====

(dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kab. Rembang Sdr. Drs.

ACHMAD MUALIF Teks Terlampir)

Terima kasih kepada Sekretaris Banggar yang telah membacakan laporannya

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Berikutnya adalah Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun 2013. Namun sebelumnya terlebih dahulu diminta masing-masing juru bicara fraksi untuk menunjukkan jari.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Fraksinya, saya persilakan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : GUNASIH, SE |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : DJOKO SUSILO |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan | : H. HAKAM, SH |
| 4. Fraksi PKB | : PUJI SANTOSO, SP, MH |
| 5. Fraksi PDI Perjuangan | : RIDWAN, SH |
| 6. Fraksi Amanat Nasional | : HM. NURHASAN |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan | : MUNTHOHID, SH |

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilakan untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya.

===== **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI** =====

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : GUNASIH, SE |
| - Membaca Teks Terlampir | |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : DJOKO SUSILO |
| - Membaca Teks Terlampir | |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan: | H. HAKAM, SH |

- Membaca Teks Terlampir
- 4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP, MH
 - Membaca Teks Terlampir
- 5. Fraksi PDI Perjuangan : RIDWAN, SH
 - Membaca Teks Terlampir
- 6. Fraksi Amanat Nasional : HM. NURHASAN
 - Membaca Teks Terlampir
- 7. Fraksi Bintang Keadilan : MUNTHOHID, SH
 - Membaca Teks Terlampir

MATRIK PERSETUJUAN FRAKSI

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju
Fraksi Demokrat	✓	
Fraksi Partai Golkar	✓	
Fraksi Persatuan Pembangunan	✓	
Fraksi PKB	✓	
Fraksi PDI Perjuangan	✓	
Fraksi Amanat Nasional	✓	
Fraksi Bintang Keadilan	✓	

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara selanjutnya yaitu, Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2013 yang akan disampaikan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang .

Bagaimana kalau Raperda APBD Tahun 2013 tidak usah dibacakan..... ?????

Setuju

(Ketuk Palu 3 Kali)

(Berhubung waktu mendesak Tidak dibacakan dengan Teks Terlampir)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Saat ini telah sampailah pada agenda pokok dalam rapat paripurna dalam Pembahasan RAPBD tahun 2013, yaitu Persetujuan Raperda tentang APBD Tahun 2013 oleh Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Untuk itu kepada seluruh Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna ini untuk lebih fokus dalam menanggapi acara pokok ini, karena ini adalah moment yang sangat penting yang menentukan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rembang setahun kedepan, dan semuanya dimulai dengan keputusan yang berdasarkan persetujuan penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 hari ini.

Kepada Saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir,

“ Apakah Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 yang disampaikan oleh Badan Anggaran dapat disetujui ?”

=====SETUJU!!!=====

(Ketuk Palu 1 Kali)

Terima kasih.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah walaupun masih melalui tahapan evaluasi gubernur, namun secara hierarhi kita telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dengan baik dan semoga

**====PENYAMPAIAN KAJIAN BADAN LEGISLASI DAERAH
TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN
REMBANG====**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara **PUJI SANTOSO, SH, MH.** yang telah menyampaikan Kajian terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Berikutnya adalah Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Namun sebelumnya terlebih dahulu diminta masing-masing juru bicara fraksi untuk menunjukkan jari.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Fraksinya, saya persilakan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

▪ **INTERUPSI : RIDWAN, SH (Fraksi PDI Perjuangan)**

Interupsi Ketua, ya masih Ketua.

Mengingat waktu kami persilahkan langsung saja disampaikan tanggapan ini secara lisan. Kepada masing-masing Fraksi diminta menyatakan pendapat secara lisan sebagai tanggapan, begitu saja saya kira. Terimakasih Ketua.

▪ **JAWABAN PIMPINAN RAPAT**

Terimakasih, langsung saja dimulai dari Fraksi Demokrat untuk menyampaikan tanggapannya.

1. Fraksi Demokrat : GUNASH
2. Fraksi Partai Golkar : SRI REJEKI, SH
3. Fraksi Persatuan Pembangunan : SA'DULLAH
4. Fraksi PKB : HM. NOOR HASAN, SH
5. Fraksi PDI Perjuangan : RIDWAN, SH
6. Fraksi Amanat Nasional : JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE
7. Fraksi Bintang Keadilan : dr. ROCHMAD ISNAINI

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilakan untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya.

===== **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI** =====

1. Fraksi Demokrat : GUNASIH, SE
- Membaca Teks Terlampir
2. Fraksi Partai Golkar : SRI REJEKI, SH
- Lisan Terlampir
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: SA'DULLAH
- Lisan Teks Terlampir
4. Fraksi PKB : HM. NOOR HASAN, SH
- Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : RIDWAN, SH
- Lisan Terlampir
6. Fraksi Amanat Nasional : JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE
- Lisan Terlampir
7. Fraksi Bintang Keadilan : dr. ROCHMAD ISNAINI
- Lisan Terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Menginjau acara selanjutnya adalah Jawaban dari Pengusul (Komisi B) atas tanggapan Fraksi - fraksi DPRD terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD Kab. Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Kepada Saudara Ketua Komisi B dipersilakan.

**==PENYAMPAIAN JAWABAN PENGUSUL (KOMISI B)
TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN
REMBANG ==**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara **JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE** yang telah menyampaikan Jawaban atas Pendapat Fraksi terhadap Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Setelah kita mengikuti acara demi acara maka sebagai akhir daripada Rapat Paripurna pada hari ini adalah " Pengambilan Persetujuan terhadap usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang"

" Apakah Usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dapat Di setuju ???? "

Setuju

(Ketuk Palu 1 Kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Acara Rapat Paripurna telah kita ikuti bersama maka Agenda Rapat Paripurna pada hari ini selesai. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Akhirnya dengan mengucap "*Alhamdulillah robbil 'alamiin*" tepat pukul 14.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

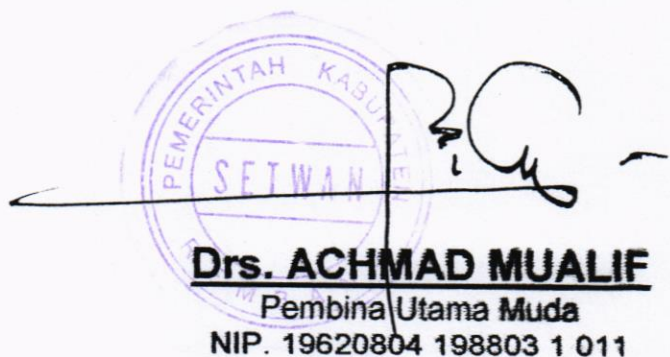
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KAB .
REMBANG (III) MEMBAHAS RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Camat
dan SKPD Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 18
Tahun 2012 tanggal 30 Nopember 2012
tentang Program Legislasi Daerah Kab.
Rembang Tahun 2013;
- LAMPIRAN III : Laporan Badan Anggaran terhadap hasil
pembahasan Raperda APBD T.A. 2013;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil
pembahasan Raperda APBD T.A. 2013;
- LAMPIRAN V : Rancangan Peraturan Daerah Kab.
Rembang tentang APBD T.A. 2013;
- LAMPIRAN VI : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab.
Rembang dengan DPRD Kab. Rembang
Nomor 019.6/621/2012 tanggal 25 Juli 2012
tentang Kebijakan Umum (KUA) APBD
Tahun Anggaran 2013;
- LAMPIRAN VII : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab.
Rembang dengan DPRD Kab. Rembang
Nomor 019.6/622/2012 tanggal 25 Juli 2012
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
REMBANG Nomor 04 Tahun 2012 tentang

Persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;

LAMPIRAN IX : Berita Acara Nomor 900/635/2012 dan Nomor 900/3588/2012 Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab. Rembang tentang Raperda APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2013;

LAMPIRAN X : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Persetujuan dan Penetapan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2013;

LAMPIRAN XI : Sambutan Bupati Rembang pada Rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2013;

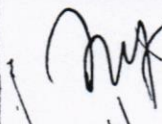



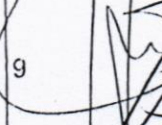

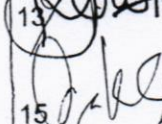


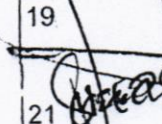
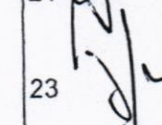

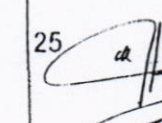



LAMPIRAN XII : Penjelasan Pengusul (Komisi B) terhadap usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kab. Rembang;

LAMPIRAN XIII : Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD dalam rangka pengkajian terhadap usul Raperda Inisiatif DPRD tentang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kab. Rembang;

- LAMPIRAN XIV : Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD terhadap usul Raperda Inisiatif DPRD tentang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kab. Rembang;
- LAMPIRAN XV : Jawaban Pengusul (Komisi B) atas terhadap usul Raperda Inisiatif DPRD tentang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kab. Rembang;
- LAMPIRAN XVI : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penetapan dan Persetujuan Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kab. Rembang.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA III
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013**

HARI / TANGGAL : JUMAT, 30 NOPEMBER 2012
JAM : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNO, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	CHAIRUL ANWAR, S Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H I S M A R I	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota		
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	SA'DULLAH	Anggota		
19	H M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S Pd	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOJEH	Anggota		
27	BUIH SANTOSO, SP	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH B A	Anggota		
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>				
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H MOH NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



Ketua

I. K. SUNARTO




NO	NAMA / JENIS	KETERANGAN
1	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
2	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
3	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
4	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
5	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
6	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
7	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
8	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
9	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
10	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
11	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
12	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
13	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
14	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
15	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
16	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
17	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
18	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
19	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>
20	<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Description]</i>

DAFTAR DAFTAR...
DIREKTORAT...



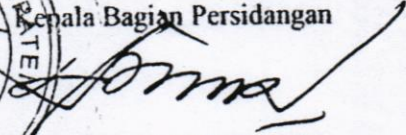
DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
 MEMBAHAS
 RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : JUMAT, 30 NOPEMBER 2012
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM		1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2.
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.	Dandim 0720 Rembang	5.
6.	ANTON W.	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7.	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.	Kejaksaan Negeri Rembang	8.

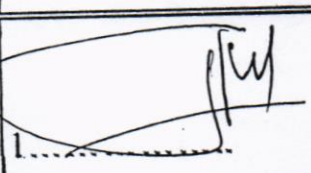





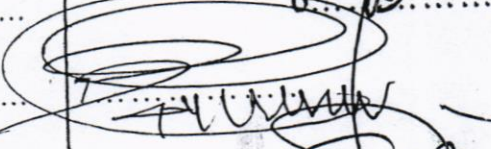
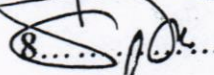
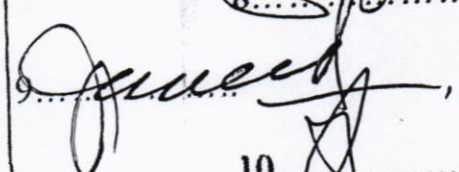
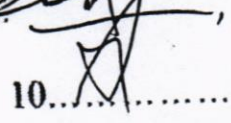





SEKRETARIS DPRD KAB.
 REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan


 Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013




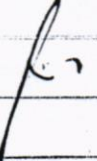




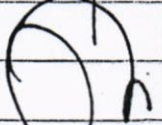
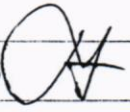
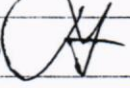


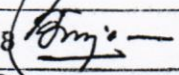
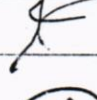
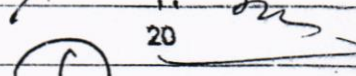
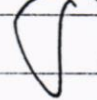



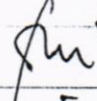
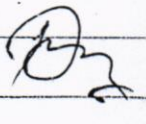
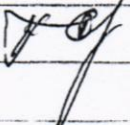


HARI / TANGGAL : JUMAT, 30 NOPEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB


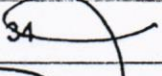

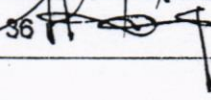

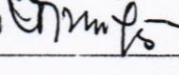

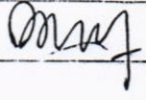
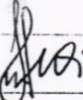
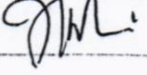
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	Bambang Sukoeso	
2	Camat Kaliori	MUSTHOCHIT	
3	Camat Sumber	HERIJONO	
4	Camat Sulang	SUKIS SUTARNO	
5	Camat Bulu	SESWA UTOMO	
6	Camat Pamotan	M. W. F. O. R.	
7	Camat Gunung	ROCH. S.	
8	Camat Sale	KEMARDI	
9	Camat Lasem	SMANTO	
10	Camat Pancur	di Harto	
11	Camat Sedan		
12	Camat Sluke	Masdiyanto	
13	Camat Kragan	Mashadi	
14	Camat Sarang	Achsanudin	


 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan
SETWAN
 Drs. YULIUS SUDARNO
 N.P. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2013

HARI / TANGGAL : JUMAT, 30 NOPEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi	PHP	1 
2	STAF AHLI BUPATI	Muhammad	SNB	2 
3	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SDM	3 
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	Suryaji	MSU	6 
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Hani Suro	Kanubag	8 all 
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P	Kabag.	9 
10	BAG. HUMAS	M. Daimi	Humas	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Karyanto	Bag. Bang.	11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Suhanda	Kabag.	12 
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Haryanto	Kanag	14 
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Suharnoh	Agus	15 
16	BAG. UMUM	Agus	Agus	16 
17	DPPKAD	SUCIPTONO	DPPKAD	17 
18	INSPEKTORAT	Soebagio	Inspektur	18 
19	BAPPEDA	Hari S	Ka	19 
20	BMPKB	Djurdji S.	Secr.	20 
21	BKD	Supremus		21 
22	BKP & P4K	Dwi Purwanti	Ka. BKP & P4K	22 
23	B'BD	SUHARSO	Ka. Lal	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Mugolo	Ka. Din	24 
25	DINAS KESEHATAN	Supriyanto	sekret	25 
26	DINAS PENDIDIKAN	Dandanyo S	Kadinas	26 
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Surasim		28 
29	DINLUTKAN	Suprman		29 
30	DINHUBKOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL			31 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA	SURYANWATI	Sek Dir	33 
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	ka	34 
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rusdiyanto	Sek Dir	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Egi W	Ke Perpustakaan	37 
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyanti	Ka KPT	38 
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO			40
41	SATPOL PP			41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	M. Slamet Soebagyo	Bendah	42 
43	P D A M			43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J			50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLI CAB. REMBANG			63
64	TP. PKK			64 
65	Radio Citra Bahari Fm	Masudi	Reporter	65 
66	Staf ahli FBK	Nitro o.s		66 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67	SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG	Susno	SEKRETARIS	67
68		SUSNO		68
69	SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG	RAJU		69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

 Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Program Legislasi Daerah disusun dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

DEWAN PERKOTAMADAEAN KOTA SURABAYA

KEPADA BUNDA RAJA SURABAYA

Surabaya, 12 Desember 2011

Yang Terhormat,

Sehubungan dengan surat keputusan nomor 123/2011/Disperdukotabarejo

tanggal 12 Desember 2011

yang menyangkut

tentang

tentang pengangkatan dan penempatan

jabatan

yang akan dilaksanakan

di lingkungan

Disperdukotabarejo, maka dengan ini saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

terhadap surat keputusan tersebut, saya sampaikan bahwa

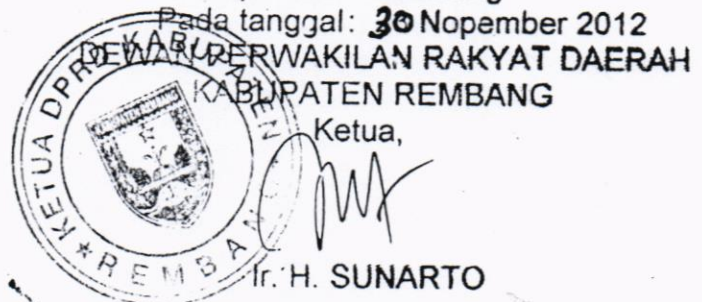
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** Menyetujui Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013, sebagaimana terlampir.
- KEDUA** Program Legislasi Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Rembang

Pada tanggal: 30 Nopember 2012



**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**



**MEMBAHAS
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DPRD KABUPATEN REMBANG
JL. P. DIPONEGORO NO. 88 REMBANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. bahwa hasil pembahasan Raperda APBD Tahun 2013 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. DASAR.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juli 2012 Nomor 019.6/621/2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juli 2011 Nomor 019.6/622/2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/3177/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dengan perihal Permohonan Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
11. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 12 Nopember 2012 dan 28 November 2012 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 14 November 2012 Jam 13.00 WIB. dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2013.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 14 November 2012 Jam 14.00 WIB. Membahas strategi dan distribusi Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2013.
- c. Rapat – rapat Komisi A,B,C,D DPRD dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
 - H a r i : Senin s/d Senin.
 - Tanggal : 19 s/d 26 November 2012.
 - Jam : 09.00 WIB s/d selesai
 - Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang.
 - Acara : Pembahasan Pendalaman atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2013.
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD pada :
 - H a r i : Selasa
 - Tanggal : 27 November 2012
 - Jam : 09.30. WIB.
 - Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.
 - Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas Pendalaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2013.
- e. Rapat Badan Anggaran DPRD pada:
 - H a r i : Selasa
 - Tanggal : 27 November 2012
 - Jam : 11.00. WIB.
 - Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Acara : Pembahasan atas Laporan Komisi terhadap
Pendalaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2013

f. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

H a r i : Kamis.

Tanggal : 29 November 2012.

Jam : 11.00 WIB.

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Rembang

Acara : Sinkronisasi dan Koordinasi Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2013.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang setelah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Tahun Anggaran 2013, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, ada beberapa perubahan dibandingkan dengan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN RANCANGAN APBD 2013

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		PEMBAHASAN	
		R APBD 2013	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	5= 4-3
1	2	3	4		
1	PENDAPATAN DAERAH	884.284.031.000	887.138.846.000	2.854.815.000	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	108.012.530.000	110.867.345.000	2.854.815.000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.022.000.000	24.022.000.000	1.000.000.000	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.117.374.000	23.856.189.000	738.815.000	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.685.706.000	4.385.706.000	700.000.000	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.187.450.000	58.603.450.000	416.000.000	
1.2	Dana Perimbangan	734.617.850.000	734.617.850.000	-	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.573.020.000	37.573.020.000	-	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	640.273.360.000	640.273.360.000	-	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	56.771.470.000	56.771.470.000	-	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41.653.651.000	41.653.651.000	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	41.653.651.000	41.653.651.000	-	
2.	BELANJA DAERAH	889.229.031.000	900.838.736.000	11.609.705.000	
2.1	Belanja Tidak Langsung	559.095.725.000	557.963.338.000	(1.132.387.000)	
2.1.1	Belanja Pegawai	478.840.781.000	478.898.081.000	57.300.000	
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000	37.000.000	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	723.000.000	723.000.000	-	
2.1.4	Belanja Hibah	38.063.598.000	37.088.911.000	(974.687.000)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.720.596.000	6.375.596.000	(345.000.000)	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	33.710.750.000	33.840.750.000	130.000.000	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
2.2	Belanja Langsung	330.133.306.000	342.875.398.000	12.742.092.000	
2.2.1	Belanja Pegawai	53.440.963.200	56.415.640.200	2.974.677.000	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.376.019.960	122.902.410.960	(473.609.000)	
2.2.3	Belanja Modal	153.316.322.840	163.557.346.840	10.241.024.000	
	Jumlah Belanja	889.229.031.000	900.838.736.000	11.609.705.000	
	surplus (devisit)	(4.945.000.000)	(13.699.890.000)	(8.754.890.000)	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10.200.000.000	18.954.890.000	8.754.890.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	10.200.000.000	18.954.890.000	8.754.890.000	
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	10.200.000.000	18.954.890.000	8.754.890.000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.255.000.000	5.255.000.000	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.200.000.000	5.200.000.000	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000	55.000.000	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.255.000.000	5.255.000.000	-	
	Pembiayaan Netto	4.945.000.000	13.699.890.000	8.754.890.000	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-	

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAN APBD 2013

NO.	SKPD	JUMLAH			
		R APBD 2013			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN		288.785.423.000	38.779.615.000	327.565.038.000
2	DINAS KESEHATAN	5.994.464.000	33.451.562.000	29.630.355.000	63.081.917.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	54.000.000.000	21.181.380.000	55.791.400.000	76.972.780.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.105.000.000	12.264.171.000	75.531.943.000	87.796.114.000
5	BAPPEDA		2.707.416.000	6.858.097.000	9.565.513.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.172.132.000	4.786.951.000	8.679.296.000	13.466.247.000
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		1.366.943.000	1.761.683.000	3.128.626.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	465.000.000	2.351.621.000	3.949.850.000	6.301.471.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7.697.126.000	5.286.153.000	12.983.279.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.452.310.000	1.985.700.000	6.438.010.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.317.903.200	8.123.457.000	4.446.085.000	12.569.542.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.444.544.000	1.894.110.000	3.338.654.000
13	SATPOL PP		2.916.151.000	1.305.537.600	4.221.688.600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.309.059.000	1.479.600.000	2.788.659.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		6.899.372.000	-	6.899.372.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		542.184.000	-	542.184.000
17	SETDA	1.684.408.000	10.807.859.000	15.140.839.000	25.948.698.000
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	21.000.000	-	1.422.000.000	1.422.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	450.000.000	450.000.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	10.807.859.000	3.319.600.000	14.127.459.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	3.586.125.000	3.586.125.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45.000.000	-	560.000.000	560.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	2.933.114.000	2.933.114.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	885.000.000	885.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1.528.408.000	-	1.405.000.000	1.405.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	580.000.000	580.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		2.806.534.000	14.828.702.000	17.635.236.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	805.621.098.800	90.856.621.000	14.731.546.000	105.588.167.000
a	(SKPD)	29.349.597.800	10.601.677.000	14.731.546.000	25.333.223.000
b	(PPKD)	776.271.501.000	80.254.944.000	-	80.254.944.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.042.879.000	2.173.240.000	5.216.119.000
21	BKD		2.913.444.000	2.719.773.900	5.633.217.900
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.070.391.000	769.200.000	1.839.591.000
23	KECAMATAN REMBANG		4.625.533.000	372.391.000	4.997.924.000
24	KECAMATAN KALIORI		1.623.833.000	220.934.000	1.844.767.000
25	KECAMATAN SULANG		1.776.326.000	230.000.000	2.006.326.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.342.193.000	210.472.000	1.552.665.000
27	KECAMATAN BULU		1.270.034.000	209.472.000	1.479.506.000
28	KECAMATAN LASEM		1.833.558.000	256.948.000	2.090.506.000
29	KECAMATAN PANCUR		1.944.633.000	213.472.000	2.158.105.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.301.984.000	208.472.000	1.510.456.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.417.038.000	220.746.000	1.637.784.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.423.894.000	217.434.000	1.641.328.000
33	KECAMATAN SALE		1.293.234.000	216.934.000	1.510.168.000
34	KECAMATAN KRAGAN		1.561.718.000	262.744.000	1.824.462.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.394.873.000	235.858.000	1.630.731.000
36	KECAMATAN SARANG		1.609.726.000	260.744.000	1.870.470.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.177.923.000	2.426.000.000	9.603.923.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.619.989.000	1.754.860.000	3.374.849.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	95.925.000	5.522.896.000	10.665.314.000	16.188.210.000
40	DINAS ESDM	-	2.200.377.000	8.834.112.000	11.034.489.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996.000.000	2.485.903.000	2.882.633.000	5.368.536.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.832.100.000	3.892.662.000	12.491.040.500	16.383.702.500
	JUMLAH	884.284.031.000	559.095.725.000	330.133.306.000	889.229.031.000

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAI

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINAS PENDIDIKAN		288.387.973.000	47.240.365.000	335.628.338.000
2	DINAS KESEHATAN	5.994.464.000	33.451.562.000	30.308.355.000	63.759.917.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	54.000.000.000	21.181.380.000	55.791.400.000	76.972.780.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.105.000.000	12.264.171.000	77.129.943.000	89.394.114.000
5	BAPPEDA		2.707.416.000	6.358.097.000	9.065.513.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.300.000.000	4.786.951.000	8.579.296.000	13.366.247.000
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		1.764.393.000	1.951.683.000	3.716.076.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	465.000.000	2.351.621.000	2.720.050.000	5.071.671.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7.697.126.000	5.286.153.000	12.983.279.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.452.310.000	1.910.700.000	6.363.010.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.317.903.200	8.123.457.000	4.231.085.000	12.354.542.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.444.544.000	1.994.110.000	3.438.654.000
13	SATPOL PP		2.916.151.000	1.265.537.600	4.181.688.600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.309.059.000	1.779.600.000	3.088.659.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		6.899.372.000	-	6.899.372.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		542.184.000	-	542.184.000
17	SETDA	1.684.408.000	10.807.859.000	18.285.239.000	29.093.098.000
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	21.000.000	-	4.770.400.000	4.770.400.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	430.000.000	430.000.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	10.807.859.000	3.244.600.000	14.052.459.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	3.732.125.000	3.732.125.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45.000.000	-	560.000.000	560.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	2.883.114.000	2.883.114.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	885.000.000	885.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1.528.408.000	-	1.200.000.000	1.200.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	580.000.000	580.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		2.806.534.000	15.185.444.000	17.991.978.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	807.760.498.800	89.666.934.000	14.481.546.000	104.148.480.000
a	(SKPD)	31.488.997.800	10.601.677.000	14.481.546.000	25.083.223.000
b	(PPKD)	776.271.501.000	79.065.257.000	-	79.065.257.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.100.179.000	2.115.940.000	5.216.119.000
21	BKD		2.913.444.000	2.719.773.900	5.633.217.900
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.070.391.000	719.100.000	1.789.491.000
23	KECAMATAN REMBANG		4.625.533.000	372.391.000	4.997.924.000
24	KECAMATAN KALIORI		1.623.833.000	370.934.000	1.994.767.000
25	KECAMATAN SULANG		1.776.326.000	230.000.000	2.006.326.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.342.193.000	210.472.000	1.552.665.000
27	KECAMATAN BULU		1.270.034.000	259.472.000	1.529.506.000
28	KECAMATAN LASEM		1.833.558.000	256.948.000	2.090.506.000
29	KECAMATAN PANCUR		1.944.633.000	238.472.000	2.183.105.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.301.984.000	208.472.000	1.510.456.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.417.038.000	220.746.000	1.637.784.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.423.894.000	217.434.000	1.641.328.000
33	KECAMATAN SALE		1.293.234.000	266.934.000	1.560.168.000
34	KECAMATAN KRAGAN		1.561.718.000	262.744.000	1.824.462.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.394.873.000	335.858.000	1.730.731.000
36	KECAMATAN SARANG		1.609.726.000	260.744.000	1.870.470.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.177.923.000	2.611.000.000	9.788.923.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.619.989.000	1.658.860.000	3.278.849.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000	5.522.896.000	10.905.314.000	16.428.210.000
40	DINAS ESDM		2.200.377.000	8.584.112.000	10.784.489.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996.000.000	2.485.903.000	2.715.033.000	5.200.936.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.382.100.000	3.892.662.000	12.636.040.500	16.528.702.500
	JUMLAH	887.138.846.000	557.963.338.000	342.875.398.000	900.838.736.000

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAI

NO:	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(397.450.000)	8.460.750.000	8.063.300.000
2	DINAS KESEHATAN	-	-	678.000.000	678.000.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	1.598.000.000	1.598.000.000
5	BAPPEDA	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	127.868.000	-	(100.000.000)	(100.000.000)
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	-	397.450.000	190.000.000	587.450.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	(1.229.800.000)	(1.229.800.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	(75.000.000)	(75.000.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	(215.000.000)	(215.000.000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	100.000.000	100.000.000
13	SATPOL PP	-	-	(40.000.000)	(40.000.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	300.000.000	300.000.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	3.144.400.000	3.144.400.000
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	-	-	3.348.400.000	3.348.400.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	(20.000.000)	(20.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	(75.000.000)	(75.000.000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	146.000.000	146.000.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	(205.000.000)	(205.000.000)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	356.742.000	356.742.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.139.400.000	(1.189.687.000)	(250.000.000)	(1.439.687.000)
a	(SKPD)	2.139.400.000	-	(250.000.000)	(250.000.000)
b	(PPKD)	-	(1.189.687.000)	-	(1.189.687.000)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	57.300.000	(57.300.000)	-
21	BKD	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	(50.100.000)	(50.100.000)
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	150.000.000	150.000.000
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	50.000.000	50.000.000
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	25.000.000	25.000.000
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	50.000.000	50.000.000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	100.000.000	100.000.000
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	185.000.000	185.000.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	-	(96.000.000)	(96.000.000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	37.547.000	-	240.000.000	240.000.000
40	DINAS ESDM	-	-	(250.000.000)	(250.000.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	(167.600.000)	(167.600.000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	550.000.000	-	145.000.000	145.000.000
	JUMLAH	2.854.815.000	(1.132.387.000)	12.742.092.000	11.609.705.000

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)							JUMLAH
		R APBD 2013							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINAS PENDIDIKAN	288.785.423.000							288.785.423.000
2	DINAS KESEHATAN	33.451.562.000							33.451.562.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	21.181.380.000							21.181.380.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	12.264.171.000							12.264.171.000
5	BAPPEDA	2.707.416.000							2.707.416.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.786.951.000							4.786.951.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.366.943.000							1.366.943.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.351.621.000							2.351.621.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.697.126.000							7.697.126.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.452.310.000							4.452.310.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	8.123.457.000							8.123.457.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.444.544.000							1.444.544.000
13	SATPOL PP	2.916.151.000							2.916.151.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.309.059.000							1.309.059.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.899.372.000							6.899.372.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	542.184.000							542.184.000
17	SETDA	10.807.859.000							10.807.859.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	10.807.859.000							10.807.859.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	2.806.534.000							2.806.534.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.601.677.000	37.000.000	723.000.000	38.063.598.000	6.720.596.000	33.710.750.000	1.000.000.000	90.856.621.000
a	(SKPD)	10.601.677.000							10.601.677.000
b	(PPKD)		37.000.000	723.000.000	38.063.598.000	6.720.596.000	33.710.750.000	1.000.000.000	80.254.944.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.042.879.000							3.042.879.000
21	BKD	2.913.444.000							2.913.444.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.070.391.000							1.070.391.000
23	KECAMATAN REMBANG	4.625.533.000							4.625.533.000
24	KECAMATAN KALIORI	1.623.833.000							1.623.833.000
25	KECAMATAN SULANG	1.776.326.000							1.776.326.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.342.193.000							1.342.193.000
27	KECAMATAN BULU	1.270.034.000							1.270.034.000
28	KECAMATAN LASEM	1.833.558.000							1.833.558.000
29	KECAMATAN PANCUR	1.944.633.000							1.944.633.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.301.984.000							1.301.984.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.417.038.000							1.417.038.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.423.894.000							1.423.894.000
33	KECAMATAN SALE	1.293.234.000							1.293.234.000
34	KECAMATAN KRAGAN	1.561.718.000							1.561.718.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.394.873.000							1.394.873.000
36	KECAMATAN SARANG	1.609.726.000							1.609.726.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7.177.923.000							7.177.923.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.619.989.000							1.619.989.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.522.896.000							5.522.896.000
40	DINAS ESDM	2.200.377.000							2.200.377.000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.485.903.000							2.485.903.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.892.662.000							3.892.662.000
	JUMLAH	478.840.781.000	37.000.000	723.000.000	38.063.598.000	6.720.596.000	33.710.750.000	1.000.000.000	559.095.725.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN PERSETUJUAN							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
1	DINAS PENDIDIKAN	288.387.973.000							288.387.973.000
2	DINAS KESEHATAN	33.451.562.000							33.451.562.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	21.181.380.000							21.181.380.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	12.264.171.000							12.264.171.000
5	BAPPEDA	2.707.416.000							2.707.416.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.786.951.000							4.786.951.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.764.393.000							1.764.393.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.351.621.000							2.351.621.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.697.126.000							7.697.126.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.452.310.000							4.452.310.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	8.123.457.000							8.123.457.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.444.544.000							1.444.544.000
13	SATPOL PP	2.916.151.000							2.916.151.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.309.059.000							1.309.059.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.899.372.000							6.899.372.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	542.184.000							542.184.000
17	SETDA	10.807.859.000							10.807.859.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	10.807.859.000							10.807.859.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	2.806.534.000							2.806.534.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.601.677.000	37.000.000	723.000.000	37.088.911.000	6.375.596.000	33.840.750.000	1.000.000.000	89.666.934.000
a	(SKPD)	10.601.677.000							10.601.677.000
b	(PPKD)		37.000.000	723.000.000	37.088.911.000	6.375.596.000	33.840.750.000	1.000.000.000	79.065.257.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.100.179.000							3.100.179.000
21	BKD	2.913.444.000							2.913.444.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.070.391.000							1.070.391.000
23	KECAMATAN REMBANG	4.625.533.000							4.625.533.000
24	KECAMATAN KALIORI	1.623.833.000							1.623.833.000
25	KECAMATAN SULANG	1.776.326.000							1.776.326.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.342.193.000							1.342.193.000
27	KECAMATAN BULU	1.270.034.000							1.270.034.000
28	KECAMATAN LASEM	1.833.558.000							1.833.558.000
29	KECAMATAN PANCUR	1.944.633.000							1.944.633.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.301.984.000							1.301.984.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.417.038.000							1.417.038.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.423.894.000							1.423.894.000
33	KECAMATAN SALE	1.293.234.000							1.293.234.000
34	KECAMATAN KRAGAN	1.561.718.000							1.561.718.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.394.873.000							1.394.873.000
36	KECAMATAN SARANG	1.609.726.000							1.609.726.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7.177.923.000							7.177.923.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.619.989.000							1.619.989.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.522.896.000							5.522.896.000
40	DINAS ESDM	2.200.377.000							2.200.377.000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.485.903.000							2.485.903.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.892.662.000							3.892.662.000
	JUMLAH	478.898.081.000	37.000.000	723.000.000	37.088.911.000	6.375.596.000	33.840.750.000	1.000.000.000	557.963.338.000

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN						
		BERTAMBAH (BERKURANG)						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Tidak Terduga
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	22 = 13-5	23 = 14-6	24 = 15-7	25 = 16-8	26 = 17-9
1	DINAS PENDIDIKAN	(397.450.000)	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-
5	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	397.450.000	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-	-	-
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	(974.687.000)	(345.000.000)	130.000.000	-
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	-	(974.687.000)	(345.000.000)	130.000.000	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	57.300.000	-	-	-	-	-	-
21	BKD	-	-	-	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-
40	DINAS ESDM	-	-	-	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	57.300.000	-	-	(974.687.000)	(345.000.000)	130.000.000	-

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		R APBD 2013			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINAS PENDIDIKAN	5.092.136.000	5.599.038.000	28.088.441.000	38.779.615.000
2	DINAS KESEHATAN	4.639.883.000	16.789.874.000	8.200.598.000	29.630.355.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	19.465.959.000	26.805.685.000	9.519.756.000	55.791.400.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.302.002.000	3.683.297.100	69.546.643.900	75.531.943.000
5	BAPPEDA	1.736.418.000	4.960.279.000	161.400.000	6.858.097.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.067.607.000	2.459.859.000	5.151.830.000	8.679.296.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	182.352.800	664.032.700	915.297.500	1.761.683.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	766.368.000	3.044.072.000	139.410.000	3.949.850.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.091.303.000	3.769.450.000	425.400.000	5.286.153.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	540.885.000	1.265.573.000	179.242.000	1.985.700.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	671.825.000	1.909.606.000	1.864.654.000	4.446.085.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.246.574.000	637.536.000	10.000.000	1.894.110.000
13	SATPOL PP	715.191.600	547.896.000	42.450.000	1.305.537.600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	268.775.000	643.609.000	567.216.000	1.479.600.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	2.981.548.000	11.019.781.000	1.139.510.000	15.140.839.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	111.425.000	1.273.325.000	37.250.000	1.422.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	212.050.000	224.950.000	13.000.000	450.000.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	712.200.000	2.587.950.000	19.450.000	3.319.600.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	180.475.000	2.705.650.000	700.000.000	3.586.125.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	171.310.000	362.690.000	26.000.000	560.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	618.098.000	2.080.326.000	234.690.000	2.933.114.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	331.645.000	513.855.000	39.500.000	885.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	442.520.000	924.860.000	37.620.000	1.405.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	201.825.000	346.175.000	32.000.000	580.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	1.698.467.000	10.488.077.000	2.642.158.000	14.828.702.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.371.728.000	4.337.943.200	8.021.874.800	14.731.546.000
a	(SKPD)	2.371.728.000	4.337.943.200	8.021.874.800	14.731.546.000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	462.890.000	1.653.050.000	57.300.000	2.173.240.000
21	BKD	565.305.000	2.107.268.900	47.200.000	2.719.773.900
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	264.320.000	472.861.360	32.018.640	769.200.000
23	KECAMATAN REMBANG	66.813.000	195.078.000	110.500.000	372.391.000
24	KECAMATAN KALIORI	36.120.000	184.814.000	-	220.934.000
25	KECAMATAN SULANG	54.075.000	145.925.000	30.000.000	230.000.000
26	KECAMATAN SUMBER	45.940.000	145.732.000	18.800.000	210.472.000
27	KECAMATAN BULU	53.725.000	151.130.000	4.617.000	209.472.000
28	KECAMATAN LASEM	47.570.000	201.478.000	7.900.000	256.948.000
29	KECAMATAN PANCUR	40.050.000	123.122.000	50.300.000	213.472.000
30	KECAMATAN SLUKE	51.810.000	116.896.000	39.766.000	208.472.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	38.320.000	158.926.000	23.500.000	220.746.000
32	KECAMATAN GUNEM	31.410.000	139.740.000	46.284.000	217.434.000
33	KECAMATAN SALE	44.404.000	152.830.000	19.700.000	216.934.000
34	KECAMATAN KRAGAN	57.765.000	177.379.000	27.600.000	262.744.000
35	KECAMATAN SEDAN	47.060.000	148.848.000	39.950.000	235.858.000
36	KECAMATAN SARANG	43.100.000	197.644.000	20.000.000	260.744.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	315.603.800	820.976.200	1.289.420.000	2.426.000.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	170.715.000	433.945.000	1.150.200.000	1.754.860.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1.052.904.000	8.837.151.000	775.259.000	10.665.314.000
40	DINAS ESDM	373.841.000	3.247.327.000	5.212.944.000	8.834.112.000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	904.355.000	1.718.630.000	259.648.000	2.882.633.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.833.845.000	3.219.660.500	7.437.535.000	12.491.040.500
	JUMLAH	53.440.963.200	123.376.019.960	153.316.322.840	330.133.306.000

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PERSETUJUAN				PEMBA
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH	
						7
1	2					
1	DINAS PENDIDIKAN	4.917.356.000	5.556.257.000	36.766.752.000		47.240.365.000
2	DINAS KESEHATAN	4.714.583.000	16.840.052.000	8.753.720.000		30.308.355.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	19.465.959.000	26.805.685.000	9.519.756.000		55.791.400.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.336.124.000	3.879.175.100	70.914.643.900		77.129.943.000
5	BAPPEDA	1.792.063.000	4.463.934.000	102.100.000		6.358.097.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.066.707.000	2.760.759.000	4.751.830.000		8.579.296.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	229.912.800	1.175.392.700	546.377.500		1.951.683.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	814.813.000	1.479.403.000	425.834.000		2.720.050.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.100.403.000	3.780.350.000	405.400.000		5.286.153.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	491.205.000	1.215.253.000	204.242.000		1.910.700.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	644.980.000	1.821.532.000	1.764.573.000		4.231.085.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.294.524.000	689.586.000	10.000.000		1.994.110.000
13	SATPOL PP	685.616.600	537.471.000	42.450.000		1.265.537.600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	268.775.000	643.609.000	867.216.000		1.779.600.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-		-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-		-
17	SETDA	5.940.848.000	11.142.996.000	1.201.395.000		18.285.239.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	3.197.675.000	1.536.175.000	36.550.000		4.770.400.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	212.050.000	217.950.000	-		430.000.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	712.200.000	2.512.950.000	19.450.000		3.244.600.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	180.475.000	2.770.650.000	781.000.000		3.732.125.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	171.310.000	362.690.000	26.000.000		560.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	608.288.000	2.040.551.000	234.275.000		2.883.114.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	331.645.000	513.855.000	39.500.000		885.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	325.380.000	842.000.000	32.620.000		1.200.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	201.825.000	346.175.000	32.000.000		580.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	1.696.660.000	10.758.672.000	2.730.112.000		15.185.444.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.367.828.000	4.216.363.200	7.897.354.800		14.481.546.000
a	(SKPD)	2.367.828.000	4.216.363.200	7.897.354.800		14.481.546.000
b	(PPKD)	-	-	-		-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	437.800.000	1.620.840.000	57.300.000		2.115.940.000
21	BKD	565.305.000	2.107.268.900	47.200.000		2.719.773.900
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	249.720.000	437.361.360	32.018.640		719.100.000
23	KECAMATAN REMBANG	66.813.000	195.078.000	110.500.000		372.391.000
24	KECAMATAN KALIORI	80.493.000	290.441.000	-		370.934.000
25	KECAMATAN SULANG	54.075.000	147.925.000	28.000.000		230.000.000
26	KECAMATAN SUMBER	45.940.000	145.732.000	18.800.000		210.472.000
27	KECAMATAN BULU	69.555.000	180.940.000	8.977.000		259.472.000
28	KECAMATAN LASEM	47.570.000	201.478.000	7.900.000		256.948.000
29	KECAMATAN PANCUR	46.825.000	141.347.000	50.300.000		238.472.000
30	KECAMATAN SLUKE	51.810.000	116.896.000	39.766.000		208.472.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	38.320.000	158.926.000	23.500.000		220.746.000
32	KECAMATAN GUNEM	31.410.000	139.740.000	46.284.000		217.434.000
33	KECAMATAN SALE	66.833.000	180.401.000	19.700.000		266.934.000
34	KECAMATAN KRAGAN	57.765.000	177.379.000	27.600.000		262.744.000
35	KECAMATAN SEDAN	50.880.000	245.028.000	39.950.000		335.858.000
36	KECAMATAN SARANG	43.100.000	197.644.000	20.000.000		260.744.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	334.793.800	956.786.200	1.319.420.000		2.611.000.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	170.715.000	433.945.000	1.054.200.000		1.658.860.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1.055.279.000	8.944.776.000	905.259.000		10.905.314.000
40	DINAS ESDM	316.791.000	3.327.640.000	4.939.681.000		8.584.112.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	879.230.000	1.565.103.000	270.700.000		2.715.033.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.826.260.000	3.223.245.500	7.586.535.000		12.636.040.500
	JUMLAH	56.415.640.200	122.902.410.960	163.557.346.840		342.875.398.000

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	HASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai 11 = 7 - 3	Belanja Barang Jasa 12 = 8 - 4	Belanja Modal 13 = 9 - 5	JUMLAH 14 = 11+12+13
1	2				
1	DINAS PENDIDIKAN	(174.780.000)	(42.781.000)	8.678.311.000	8.460.750.000
2	DINAS KESEHATAN	74.700.000	50.178.000	553.122.000	678.000.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	34.122.000	195.878.000	1.368.000.000	1.598.000.000
5	BAPPEDA	55.645.000	(496.345.000)	(59.300.000)	(500.000.000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(900.000)	300.900.000	(400.000.000)	(100.000.000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	47.560.000	511.360.000	(368.920.000)	190.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48.445.000	(1.564.669.000)	286.424.000	(1.229.800.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.100.000	10.900.000	(20.000.000)	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(49.680.000)	(50.320.000)	25.000.000	(75.000.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(26.845.000)	(88.074.000)	(100.081.000)	(215.000.000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	47.950.000	52.050.000	-	100.000.000
13	SATPOL PP	(29.575.000)	(10.425.000)	-	(40.000.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	300.000.000	300.000.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	2.959.300.000	123.215.000	61.885.000	3.144.400.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	3.086.250.000	262.850.000	(700.000)	3.348.400.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	(7.000.000)	(13.000.000)	(20.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	(75.000.000)	-	(75.000.000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	65.000.000	81.000.000	146.000.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(9.810.000)	(39.775.000)	(415.000)	(50.000.000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	(117.140.000)	(82.860.000)	(5.000.000)	(205.000.000)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(1.807.000)	270.595.000	87.954.000	356.742.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(3.900.000)	(121.580.000)	(124.520.000)	(250.000.000)
a	(SKPD)	(3.900.000)	(121.580.000)	(124.520.000)	(250.000.000)
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(25.090.000)	(32.210.000)	-	(57.300.000)
21	BKD	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(14.600.000)	(35.500.000)	-	(50.100.000)
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	44.373.000	105.627.000	-	150.000.000
25	KECAMATAN SULANG	-	2.000.000	(2.000.000)	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	15.830.000	29.810.000	4.360.000	50.000.000
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	6.775.000	18.225.000	-	25.000.000
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	22.429.000	27.571.000	-	50.000.000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	3.820.000	96.180.000	-	100.000.000
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	19.190.000	135.810.000	30.000.000	185.000.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	(96.000.000)	(96.000.000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.375.000	107.625.000	130.000.000	240.000.000
40	DINAS ESDM	(57.050.000)	80.313.000	(273.263.000)	(250.000.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(25.125.000)	(153.527.000)	11.052.000	(167.600.000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(7.585.000)	3.585.000	149.000.000	145.000.000
	JUMLAH	2.974.677.000	(473.609.000)	10.241.024.000	12.742.092.000

C. REKOMENDASI

1. Untuk Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, pada rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik baru dianggarkan sebesar Rp. 2.295.700.000,- . Anggaran tersebut hanya cukup untuk 6 bulan saja, Kami merekomendasikan untuk sisa kebutuhan sebesar Rp. 2.024.300.000,- dapat dianggarkan pada APBD Perubahan T.A. 2013
2. Merujuk surat dari Kementerian Pertanian (Badan Penyuluh dan Pengembangan sumberdaya Manusia Pertanian) No. 6176/KU/20/J.2/11/2012 tentang Dukungan Penyediaan Tambahan Honor dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian, maka bagi Pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan Honorarium dan BOP selama 2 (dua) bulan periode November s.d Desember 2012 yaitu sebesar Rp. 67.050.000,- sesuai dengan telaah staf dari BKP dan 4K kepada Bupati tertanggal 19 Oktober 2012. Kami merekomendasikan anggaran tersebut dapat dialokasikan pada APBD Perubahan T.A. 2013.
3. Untuk segera melakukan penyesuaian tentang alokasi Dana Bantuan Propinsi di masing-masing Dinas terkait.
4. Dalam Penganggaran tahun berikutnya agar penanganan Pemadam Kebakaran dialihkan dari DPU ke BPBD, karena sesuai dengan tupoksinya, sekaligus Pemda segera menata legal formalnya.
5. Pemerintah daerah segera menyiapkan sopir khusus untuk Pemadam Kebakaran, karena selama ini sopirnya masih serabutan.
6. Anggaran Pemeliharaan rutin jalan harusnya dianggarkan setiap tahun yang besar kecilnya sesuai dengan panjangnya ruas jalan dikabupaten Rembang.
7. Pengadaan alat berat di DPU perlu ditambah.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013,

selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD pada
Rapat Paripurna III (ketiga) DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 November 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

BADAN ANGGARAN

Ketua,



Ir. H. SUNARTO

Sekretaris,

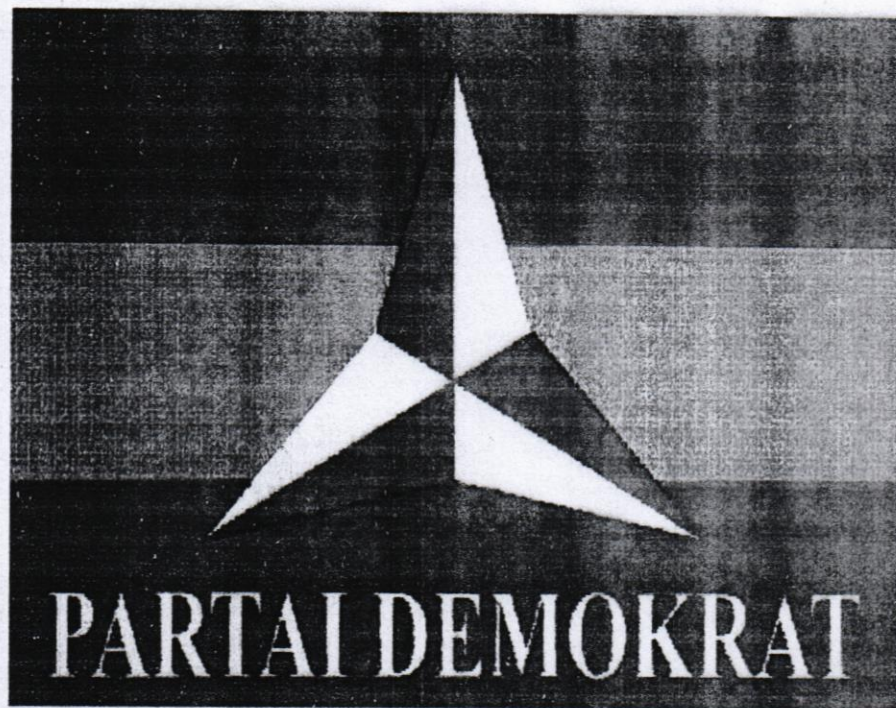


Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

2

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
DEMOKRAT
A T A S
RAPERDA APBD TAHUN 2013
KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang 30 Nopember 2012
DIBACAKAN OLEH: H.MOCH GUNASIH,SE.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP RAPERDA

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013

KABUPATEN REMBANG

Rabu, 30 Nopember 2012

Dibacakan oleh : H. Moch Gunasih,SE.

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan wakil bupati
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Saudara Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Rembang
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan Kehadiran Allah SWT. Bahwa pada hari ini kita masih diberi Rahmat dan HidayahNya yang berupa kesehatan dan kenikmatan hidup sehingga kita masih dapat bertemu dan bertatap muka dalam Rapat Paripurna Tentang Persetujuan DPRD Atas RAPERDA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013. Sebelumnya kami tidak lupa mengucapkan Selamat Kepada Guru yang telah Merayakan Hari Guru Nasional, semoga menjadi Guru yang bisa digugu dan ditiru serta Profesional dalam melaksanakan Tugas sehingga menghasilkan Generasi yang tangguh dimasa yang akan datang .Amin.

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami tidak lupa mengucapkan Selamat Ulang Tahun Korp Pegawai Negeri Sipil yang jatuh [pada tanggal 29 Nopember 2012, semoga menjadi Abdi Negara Yang lebih baik dalam meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

BUPATI, WAKIL BUPATI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT;

Setelah mengalami Pembahasan yang mendalam di Tingkat Komisi – Komisi dengan SKPD ada beberapa mata Anggaran yang bergeser , berkurang, bertambah itu semua merupakan kerja keras kami untuk merasionalisasi, Efektifitas dan tepat sasaran. Semoga dengan hasil pembahasan kami ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang lebih maju, Kondusif dan tertata dengan baik .

BUPATI, WAKIL BUPATI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan mengucap **BISMILLAHIROHMANIROHIM**, Kami Fraksi Demokrat **Menerima Dan Menyetujui RAPBD Tahun 2013** untuk ditetapkan sebagai PERDA APBD Tahun 2013.

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami Fraksi Demokrat memberikan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti antara lain :

1. Mohon ditahun yang akan datang Unit pemadam kebakaran yang sekarang berada di Dinas Pekerjaan Umum agar dipindahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sekaligus dipersiapkan Legal Formalnya serta tenaga sopirnya
2. Kegiatan **MUSRENBANG** agar tidak terkesan Formalitas kami dari Fraksi Demokrat mengusulkan Rp.50.juta Rp. 100 juta perdesa untuk kegiatan Pembangunan didesa
3. BUMD yang kinerjanya baik agar bisa diberi tambahan modal

4. Dengan ditambahkan Pembangunan tempat parkir Sendangasri Lasem supaya ditingkatkan Kapasitas dan Kualitasnya sehingga tidak ada lagi Truk-truk besar yang parkir sembarangan.
5. Untuk Dinas ESDM agar memantau Reboisasi dilahan bekas tambang .

Demikian pendapat akhir fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Bupati, Wakil Bupati Saudara ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kekuatan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, Bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf .

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Rembang, 30 Nopember 2012

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA


H. HARNO, SE



SEKRETARIS


IMRO'ATUS SOLICHAH, SE.

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN REMBANG



terhadap
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2013



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2013

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Hari Jum'at, 30 Nopember 2012
Juru Bicara : Djoko Soesilo.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (dahulu MUSPIDA) Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang terhormat nan bahagia.

Sampai saat ini Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kita semua. Karena itulah, Fraksi Partai GOLKAR mengajak panjenengan semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat-NYA seraya mohon agar kita selalu diberi keimanan dan kekuatan agar kedepan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ibarat aliran darah dalam tubuh manusia; ia menentukan kuat lemahnya seseorang, menentukan sehat sakitnya manusia, menentukan keseimbangan jiwa dan raga seseorang, bahkan menentukan hidup matinya manusia; sedang Pemerintah Daerah bersama DPRD ibarat jantung yang mengolah dan memompakan darah keseluruh tubuh. Maka bila terjadi gangguan dalam peredaran darah, seseorang akan sakit dan tidak bisa beraktivitas.

Namun ironisnya, setiap pembahasan RAPBD Kabupaten Rembang, apakah itu RAPBD Induk atau Perubahan selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain mendesaknya waktu eksekutif dalam menyajikan bahan (RKA SKPD) yang akan diolah, serta waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan pembahasan. Salah satu hal, ada 1 barang dengan merek dan type yang sama tapi harga satuannya berbeda untuk 2 atau beberapa kegiatan berbeda. Hal ini mengakibatkan kualitas maupun kuantitas pekerjaan/kegiatan APBD yang dihasilkan tidak memenuhi harapan yang diinginkan.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan maraton antara komisi-komisi DPRD bersama SKPD, sampailah saatnya Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dan beberapa hal yang dihadapi masyarakat Kabupaten Rembang di tahun 2013 mendatang, sbb:

1. SKPD yang target PAD-nya meningkat, hendaknya sungguh-sungguh bekerja dan menghindari kebocoran agar PAD benar-benar tercapai bahkan melampaui.
2. Penyertaan modal dari APBD kepada BUMD (PD BPR BKK Lasem, PD BPR BKK Kaliori, PDAM dan PD BPR Bank Pasar), supaya betul-betul menghasilkan deviden pada PAD.
3. Taman Rekreasi Pantai Kartini yang pengelolaannya diserahkan pada pihak ketiga, pada TA 2012 ini targetnya sebesar Rp. 950 jt, tapi sampai saat ini (akhir Nopember 2012) baru setor Rp. 550 jt termasuk didalamnya Rp. 300 jt tunggakan setoran TA 2011. Sehubungan dengan hal ini kami minta kepada DISBUDPARPORA segera berkomunikasi dengan pihak ketiga agar bisa setor sesuai dengan MOU/perjanjian yang sudah disepakati.

4. Penyaluran bantuan sosial/hibah yang berada pada SKPD supaya disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD yang bersangkutan, disamping itu harus diberikan penjelasan kepada penerima bantuan sosial/hibah tentang tata cara permohonan dan pencairannya.
5. Apabila disaat mendatang ada kegiatan penanaman tembakau yang bekerjasama dengan pihak ketiga, diharapkan pemerintah membuat MOU (nota kesepakatan) yang jelas agar petani tidak dirugikan.
6. DISDUKCAPIL agar meningkatkan pelayanan KK/KTP kepada masyarakat dengan menyediakan blangko KK/KTP SIAK dalam jumlah yang cukup.
7. Kami minta kepada Bupati agar memberikan tunjangan kepada Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok, minimal setara dengan UMK (upah minimum kabupaten).
8. Pemerintah agar menganggarkan tali asih bagi Perangkat Desa yang purna tugas, mengingat masa bakti mereka cukup lama.
9. Menyikapi wacana yang berkembang tentang rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kabupaten Rembang, Fraksi Partai GOLKAR menghimbau dalam pembebasan lahan untuk bahan baku semen agar dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Ada piweling dalam Budaya Jawa: "*Punggawa kang seneng marang kawula iku dadi senenge kawula sajroning praja, agawe kukuh sarta minangka tamenging praja*", artinya Pejabat yang mencintai rakyat akan disayangi rakyat dalam negara tsb. dan membuat kokohnya negara serta menjadi perisai negara. Maka sebagai pelayan masyarakat marilah kita benar-benar memperhatikan suara dan aspirasi masyarakat.

Mengakhiri keberadaan kami di mimbar ini, Fraksi Partai GOLKAR menyatakan sependapat atas ditetapkannya RAPERDA APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 menjadi PERDA APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013. Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua,


H. ISMARI



Sekretaris,


DJOKO SOESILO

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2012
Dibacakan oleh : H. HAKAM, SH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2013

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2012
Dibacakan oleh : H. HAKAM, SH.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinlah kami mengajak kepada para hadirin sidang dewan yang terhormat, marilah kita senantiasa bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang selalu benar janjinya, Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada para hambanya serta memberi petunjuk bagi siapapun yang dikehendaki.

Sholawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Akhir zaman, Nabi yang tiada lagi Nabi setelahnya, Nabi yang pada dirinya terdapat tauladan yang baik; Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya besok di hari akhir nanti . Amien.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Bahwa Pembangunan di suatu daerah tentu melalui tahapan-tahapan yakni; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahapan – tahapan tersebut, FP3 sangat berharap ke depan untuk lebih dipersiapkan dengan baik dengan waktu yang cukup, meskipun kami menyadari bahwa perubahan-perubahan itu merupakan dinamika pembahasan, dan itu merupakan sesuatu yang niscaya adanya.

FP3 memberikan apresiasi kepada saudara-saudara anggota dewan yang terhormat dan tim dari eksekutif yang telah bekerja keras membahas Rancangan APBD ini program demi program, berapa besaran anggaran yang dibutuhkan, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, dengan penuh semangat. Semua ini dilakukan dalam rangka mencari formula yang tepat untuk sebuah APBD yang ideal yang dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Meskipun kami yakin semakin-yakinnya bahwa tidak mungkin hasil pembahasan RAPBD ini memuaskan semua pihak bahkan jauh dari kata sempurna, sebab kesempurnaan hanya milik Allah, SWT.

Bahwa Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu daerah (kabupaten / kota) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan ditingkat propinsi dan pembangunan Nasional.

Bahwa Pembangunan suatu daerah yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tentu harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilaksanakan, berapapun besarnya nilai anggaran yang digunakan berasal dari APBD. Karena itu transparan dan akuntabel adalah kata kunci dari usaha penciptaan pemerintahan yang bersih.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin sidang dewan yang terhormat.

Bahwa pembangunan dibidang infrastruktur jalan, terutama jalan, FP3 memberikan apresiasi dengan yang baik atas program tersebut. Kami menganggap bahwa akses jalan merupakan sarana yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian. Akses jalan antar desa, antar kecamatan dan jalur-jalur penting lainnya FP3 meminta agar segera perbaiki. Sekali lagi, bahwa hal ini dalam rangka meningkatkan tarap hidup masyarakat lewat geraknya roda perekonomian. Karena pentingnya infrastruktur jalan ini, maka FP3 meminta agar anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan harus selalu dianggarkan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin sidang dewan yang terhormat.

Bahwa sebagai salah satu kebutuhan mendasar (Basic need) dari masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. FP3 sangat berharap kepada pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. RSUD dr. R Sutrasno dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada hendaknya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, *wal hasil*; apapun masalahnya masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik dan pemerintah berkewajiban untuk melayaninya.

Di bidang pendidikan, FP3 sangat memberikan apresiasi positif terhadap terobosan yang dilakukan pemerintah. Bahwa aksesibilitas pendidikan tidak sebatas pada pendidikan dasar dan menengah saja, akan tetapi sampai pada tingkat SMA/MA/SMK dan tentu ini hanya bagi masyarakat kurang mampu. FP3 meminta hal tersebut juga berlaku untuk pendidikan keagamaan, Madrasah Diniyyah, TPQ dan Pondok Pesantren, yang tentu ini barengi dengan penertiban-penertiban pada lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ada.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia...

Sebelum kami mengakhiri pendapat akhir fraksi ini, FP3 mengingatkan kepada pemerintah bahwa mengingat beberapa hari lagi APBD tahun 2012 akan "tutup buku", maka semua kegiatan/proyek baik yang fisik maupun tidak untuk segera selesaikan

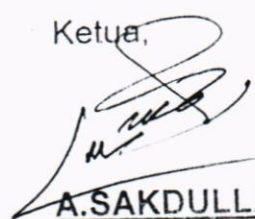
Selanjutnya bahwa dalam penganggaran suatu program, harus benar-benar tepat sesuai dengan tupoksi masing-masing, jangan sampai terjadi "salang tunjang".


Akhirnya dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiem*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **MENYETUJUI** Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013 untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2013 dengan segala perubahannya.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan ini kami sampaikan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

APBD ini dari kita untuk kita. Semoga...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

A.SAKDULLAH

Fraksi PPP


Sekretaris,

KODRIYAH, S.Pd



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

disampaikan oleh puji santoso

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Jum'at, 30 Nopember 2012

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mengawali pendapat akhir kami terhadap raperda APBD tahun anggaran 2013 ini perkenankan kami mengingatkan kepada semua pemangku kebijakan untuk mewaspadai musim hujan yang mulai mengguyur kota tercinta. Kesiapsiagaan kita terhadap curah hujan akan mampu mengantisipasi madlarat yang mungkin terjadi.

Perkenankan kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan selamat berhari PGRI kepada para guru yang telah berjasa bagi kebangkitan bangsa dari masa suram menjadi masa benderang. Jangan sampai terjadi setelah jaman benderang ini kembali kepada jaman suram karena mutu pendidikan yang ada tidak mampu mengajarkan etika dan norma-norma yang berbudi luhur.

Bagi kami, yang sebagian besar adalah santri tidak pernah ada ungkapan mantan guru, guru selamanya tetap guru. Kami merasakan betul berkat do'a para guru kami semua mampu berkhidmat pada kabupaten tercinta ini, dalam tradisi kami tranformasi pendidikan bukan sekedar transaksi atas jawaban-jawaban soal ujian yang diajarkan oleh mereka yang "mengaku" guru.

Kami juga menyampaikan selamat kepada jajaran KORPRI, korp PNS atas hari jadinya yang sebentar lagi kita peringati bersama. Bagi selalu bangga dengan korp PNS yang berdedikasi dan berkomitmen untuk melayani masyarakat melalui birokrasi yang mudah dan terjangkau. Kami juga lebih berharap agar ada korp PNS yang lahir karena prestasi-prestasinya, bukan karena adanya dugaan transaksional.

Selamat datang jama'ah haji Rembang semoga menjadi haji yang mabrur untuk memberi teladan ibadah bagi yang lain, semoga sa'inya mampu meneladani keihlasan nabi Ismail alaihissalam, dan dosanya diampuni karena pertaubatan yang sempurna untuk tidak mengulangi lagi perbuatan salah, dan mendapatkan perdagangan yang tak merugi.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Kami sepakat dengan pepatah "semakin tinggi pohon, maka semakin besar terpaan anginnya" dan dalam versi plesetan bisa kita artikan "semakin besar pinggul kita semakin besar peluangnya untuk buang angin". Dalam konteks ini kami berharap TAPD lebih sigap dalam memproses, menyusun dan mempersiapkan data-data dalam pembahasan RAPBD kabupaten Rembang. Jangan ada lagi penyerahan draft RAPBD kepada DPRD dalam bentuk selebaran kertas, sungguh hal ini adalah sesuatu yang kurang elok. Apalagi jika dikaitkan dengan opini publik yang sudah terbangun atau sengaja dibangun, bahwa DPRD sengaja mengulur ulur waktu pembahasan RAPBD tahun 2013.

*hanya satu
beredel saja*

Selanjutnya, kami berharap kepada semua pihak atas dampak negatif dari munculnya perubahan sosial, dari sedikit orang yang mampu memanfaatkan secara positif perubahan sosial. Dampak sosial yang nyata di depan mata kita adalah perilaku remaja-remaja yang sebagian adalah anak-anak kita; mbolos sekolah, kebebasan yang di luar batas, narkoba dan lain lain. Sekali lagi, tampaknya kita (para pengambil kebijakan) membiarkan fenomena ini dan seolah-olah mengatakan "jamannya begini mau apa lagi". Tidak ada tindakan nyata berupa regulasi untuk mengantisipasi.

Di bidang perencanaan pembangunan, kami berharap pemkab mampu menyusun perencanaan secara teliti agar tidak muncul lahirnya bangunan-bangunan yang tidak memenuhi persyaratan, alias gampang rusak. Beberapa bangunan yang cepat rusak banyak terjadi pada bangunan talud yang menyebabkan air tidak mengalir, kualitas bangunan yang asal asalan, kualitas bahan baku yang tidak sesuai standard. Juga bangunan jalan yang mudah rusak ataupun pembangunan saluran yang tak berfungsi apalagi menghadapi musim hujan. Termasuk hal ini adalah bangunan gedung-gedung SD tempat anak-anak kita belajar. Adakah kita tahu bahwa keuntungan yang kita terima merupakan pemicu ancaman bagi yang lainnya. Dari sinilah kita membutuhkan alat ukur sederhana yang mudah dipahami masyarakat untuk menilai indikator bahan baku yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Lebih jauh kami berharap jangan ada Kepala Dinas, Kantor, atau yang lainnya yang masih memiliki atasan lagi selain Kepala Daerah ataupun Sekretaris Daerah.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

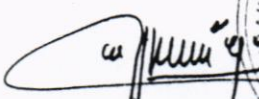
Pada prinsipnya kami memberikan apresiasi atas besarnya anggaran untuk pendidikan, tetapi sayang belum mampu juga secara optimal mampu mengakomodasi tenaga kerja honorer, GTT, dan PTT. Sama halnya besarnya belanja pegawai yang di atas 60% dari anggaran APBD belum juga mampu mengakomodasi insentif bagi perangkat desa dan kepala desa. Jika saja

kita memiliki pandangan yang sama bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan, maka tak perlu khawatir untuk mengalokasikan anggaran bagi desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bersama dengan catatan-catatan di atas, farski partai kebangkitan bangsa dapat menerima RAPBD ini untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Perda APBD.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 30 Nopember 2012
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Asnawi, SPd
Ketua


Puji Santoso, SE
Sekretaris





Pendapat Akhir
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Dibacakan Oleh,
RIDWAN, SH.MH.

PADA SIDANG PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
JUMAT, 30 NOVEMBER 2012



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

MERDEKA...!!!

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yang terhormat, Saudara Ketua beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan dan Saudara-Saudaraku Anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang terhormat, Saudaraku yang tergabung dalam Forum Koordinasi Daerah.

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Saudara Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta Saudaraku-Saudaraku Camat se-Kabupaten Rembang;

Para Kepala Desa, Perangkat Desa, hadirin, Peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang berbahagia

Mengawali Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini, marilah kita selalu bersyukur ke hadirat Ilahi Robbi, atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga di pagi ini, kita semua dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari (semoga) dibawah lindungan dan petunjukNya.

Hadirin Sidang Paripurna yang Berbahagia

Sehubungan dengan telah dibahasnya Raperda dimaksud, perkenankanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Kepada para Kepala Desa, para Perangkat Desa dan para khalayak, kami memohon maaf, atas ketidakberdayaan dalam menghadapi suara, sikap dan kepentingan mayoritas Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD sehingga perjuangan terhadap tuntutan Saudara-Saudaraku atas kenaikan Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, kenaikan Alokasi Dana Desa, dan terakomodirnya keputusan-keputusan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab dalam APBD Kabupaten Rembang mental dan kalah melawan suara, sikap dan kepentingan mayoritas. Namun, amanat, tuntutan dan kehendak tentang semua ini, akan terus kami kawal baik melalui Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, loby-loby politik maupun komunikasi politik yang intens.

Hadirin Sidang Paripurna yang Berbahagia

2. Dengan selesainya waktu pembahasan ini maka kami patut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta para jamaahnya.

Para SKPD dan aparatur di dalamnya yang telah dengan penuh ketelatenan, pemahaman dan sinergitas yang terbangun selama ini sehingga APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini dengan berbagai tafsir atas bentuk, wajah dan postur bisa diselesaikan dengan baik.

3. Dengan disahkannya Raperda ini menjadi Perda maka Fraksi PDI Perjuangan mewanti-wanti agar dalam melaksanakan anggaran demi anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, cermat, teliti dan ati-ati.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang dibuat sebagai bentuk persetujuan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

MERDEKA...!!!

Rembang, 30 November 2012

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

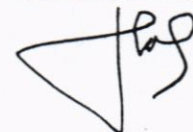
KETUA,



JASMANI



SEKRETARIS,



SUMARSIH



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA APBD T.A 2013**

30 NOVEMBER 2012

PERMUSYAWARATAN NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

TERHADAP

RAPERDA APBD T.A 2013

Dibacakan Oleh : NURHASAN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2013 dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang konsisten mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan audiensi Guru Pendawa dan Perangkat Desa se Kabupaten Rembang, kami berharap pihak-pihak terkait untuk tidak berdiri berhadap-hadapan dan tetap

menjaga kondusifitas Kabupaten Rembang, sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kami sependapat bahwa peran Kepala Desa/Lurah dan para perangkat desa sangat vital dalam proses pembangunan daerah, untuk itu optimalisasi peran Kepala Desa/Lurah dan para perangkat desa baik dalam forum-forum musyawarah atau keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan harus senantiasa kita tingkatkan.

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, pembahasan RAPBD T.A 2013 dapat kita selesaikan tepat waktu, meskipun waktu yang tersedia sangat pendek. Semoga tidak mengurangi kualitas dan bobot dari RAPBD T.A 2013 dan kami berharap pengalaman ini tidak akan terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Beberapa rekomendasi sudah kami sampaikan melalui forum komisi ataupun banggar, ada beberapa catatan berkaitan dengan RAPBD T.A 2013 :

1. Tentang Belanja Subsidi sebesar Rp. 723.000.000,00, yang akan dialokasikan untuk subsidi penyelenggaraan Pasar Murah. Kegiatan ini sudah pasti bermanfaat untuk masyarakat kecil. Penjelasan dari Bagian terkait, subsidi ini hanya diberikan saat kegiatan pasar murah dan untuk jumlah yang terbatas. Kami berharap dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah daerah berhati-hati dan cermat, mengingat sesuai aturan yang berlaku subsidi adalah subsidi biaya produksi atas produk tertentu, sehingga dapat meringankan beban masyarakat umum (seperti pupuk, LPG atau BBM).
2. Tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan, kami melihat perlunya disediakan Alat Timbangan untuk mengukur secara pasti

tonase muatan masing-masing kendaraan. Kami mensinyalir masih terdapat selisih tonase riil dengan yang dicatat oleh petugas dan ini disebabkan karena keterbatasan peralatan yang ada.

3. Tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah harus disertai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan kami menyetujui Raperda APBD T.A 2013 untuk disahkan sebagai Perda. Semoga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan pada T.A 2013 dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin. *Billahi taufiq wal hidayah.*

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 30 November 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.



Sekretaris

MOH. IMAM ZARKASI

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2013**



REMBANG, 29 NOPEMBER 2012

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**HASIL PEMBAHASAN KAPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2013**



REMBANG , 29 NOPEMBER 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos
59251

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Jum'at, 30 Nopember 2012

Dibacakan oleh : MUNTTHOHID , SH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati , Sdr. Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Staf ahli Bupati , Asisten Sekretaris Daerah , Kepala

Badan , Kepala Dinas , Kepala Kantor , Kepala Bagian dan Camat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang berbahagia

serta semua Masyarakat Rembang yang kami cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNYA kita dapat menyelesaikan semua tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013, sekaligus dapat hadir dalam sidang paripurna ini dalam rangka penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2013.

Setelah melakukan pencermatan dan pengkajian baik di tingkat Fraksi maupun di tingkat Komisi - komisi. FBK dapat memahami dan menerima RAPBD Tahun Anggaran 2013 menjadi PERDA APBD KABUPATEN REMBANG 2013. Dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pembahasan RAPBD yang terlalu singkat berdampak pada sempitnya waktu untuk melakukan pencermatan , oleh karena itu FBK merekomendasikan agar hal semacam ini ke depan tidak terulang lagi.
2. Menanggapi adanya demo yang di lakukan Guru Pandowo, perlu di sikapi dengan arif dan bijaksana sesuai aturan yang ada. Mengingat, mereka sebagai ujung tombak pemerintahan maka ada baiknya kita bisa menyelesaikan dengan sebaik - baiknya agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan.
3. Sehubungan dengan masih banyaknya keluhan para wali siswa khususnya di sekolah RSBI terkait dengan banyaknya Iuran yang ada , FBK mengharapkan agar

kedepan segala bentuk luran dikomunikasikan dengan sebaik – baiknya kepada wali murid dan tetap selalu mengacu pada peraturan yang berlaku.

4. Menghadapi musim penghujan dan musim tanam , FBK mengharapkan agar dinas terkait senantiasa mengupayakan ketersediaan stok pupuk bagi para petani.

Demikian pendapat Akhir terhadap RAPBD Kabupaten Rembang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maturnuwun.

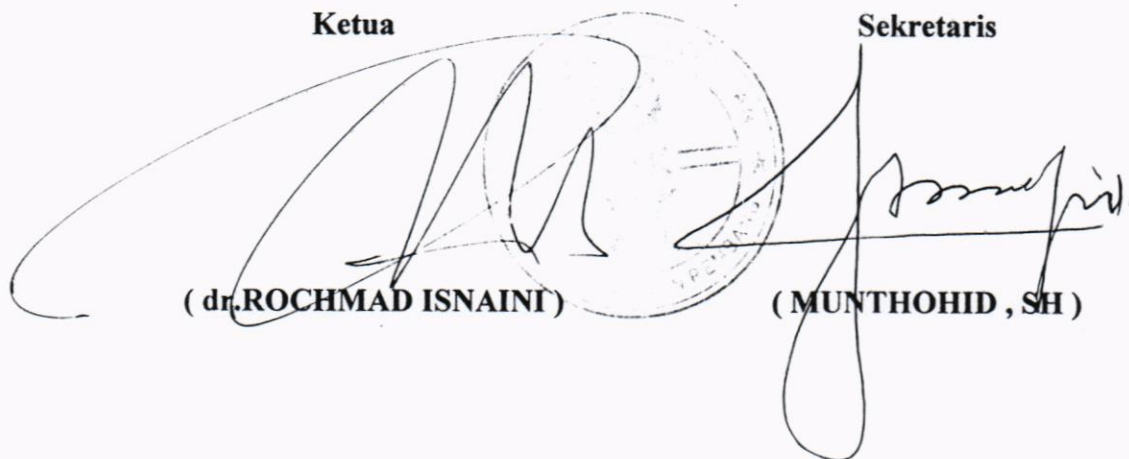
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang , 30 Nopember 2012

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua

Sekretaris



(dr.ROCHMAD ISNAINI) (MUNTHOHID , SH)



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 Juli 2012 serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Juli 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 887.138.846.000,00
2. Belanja Daerah	Rp. 900.838.736.000,00 (-)
	<u>(Rp. 13.699.890.000,00)</u>
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp 18.954.890.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 5.255.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp 13.699.890.000,00 (-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp 110.867.345.000,00; |
| b. Dana perimbangan sejumlah | Rp 734.617.850.000,00; |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp 41.653.651.000,00. |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp 24.022.000.000,00; |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 23.856.189.000,00; |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp 4.385.706.000,00; |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp 58.603.450.000,00. |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- | | |
|---|------------------------|
| a. dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp 37.573.020.000,00; |
| b. dana alokasi umum sejumlah | Rp 640.273.360.000,00; |
| c. dana alokasi khusus sejumlah | Rp 56.771.470.000,00. |

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. hibah sejumlah | Rp | 0,00; |
| b. dana darurat sejumlah | Rp | 0,00; |
| c. dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah Lainnya sejumlah | Rp | 41.653.651.000,00; |
| d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | 0,00; |
| e. bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp | 0,00. |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 557.963.338.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 342.875.398.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp | 478.898.081.000,00 |
| b. belanja bunga sejumlah | Rp | 37.000.000,00 |
| c. belanja subsidi sejumlah | Rp | 723.000.000,00 |
| d. belanja hibah sejumlah | Rp | 37.088.911.000,00 |
| e. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp | 6.375.596.000,00 |
| f. belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sejumlah | Rp | 0,00 |
| g. belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sejumlah | Rp | 33.840.750.000,00 |
| h. belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp | 56.486.040.200,00 |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp | 122.593.991.470,00 |
| c. belanja modal sejumlah | Rp | 163.795.366.330,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. penerimaan sejumlah | Rp | 18.954.890.000,00 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp | 5.255.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah (SiLPA) | Rp | 18.954.890.000,00 |
| b. pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. penerimaan pinjaman sejumlah | Rp | 0,00 |

- | | | | |
|----|---|----|------|
| e. | penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah | Rp | 0,00 |
| f. | penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| g. | pencairan Deposito sejumlah | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | | |
|----|--|----|------------------|
| a. | pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. | penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah | Rp | 5.200.000.000,00 |
| c. | pembayaran pokok utang sejumlah | Rp | 55.000.000,00 |
| d. | pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 019.6 / 621 / 2012

TANGGAL : 25 Juli 2012

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Moch. Salim
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang

2. a. Nama : Ir. H. Sunarto
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

- b. Nama : Catur Winanto, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

- c. Nama : H. Majid Kamil M.Z.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

- d. Nama : Suwanto
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi–asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2013.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013.

Rembang, 25 Juli 2012

BUPATI REMBANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

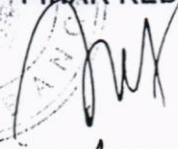


H. MOCH. SALIM

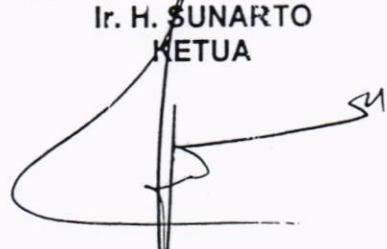


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


Selaku,
PIHAK KEDUA



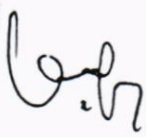
**Ir. H. SUNARTO
KETUA**



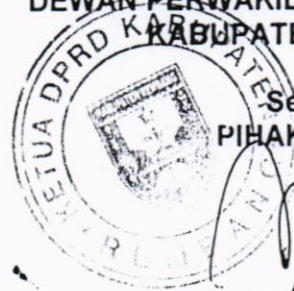
**CATUR WINANTO, SH.
WAKIL KETUA**



**H. MAJID KAMIL M.Z.
WAKIL KETUA**



**SUWANTO
WAKIL KETUA**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 019.6 / 622 / 2012

TANGGAL : 25 Juli 2012

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Moch. Salim
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang

2. a. Nama : Ir. H. Sunarto
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

b. Nama : Catur Winanto, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

c. Nama : H. Majid Kamil M.Z.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

d. Nama : Suwanto
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, para pihak

sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2013, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2013.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

Rembang, 25 Juli 2012

BUPATI REMBANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. MOCH. SALIM


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA




**SUNARTO
KETUA**

**CATUR WINANTO, SH.
WAKIL KETUA**



**H. MAJID KAMIL M.Z.
WAKIL KETUA**



**SUWANTO
WAKIL KETUA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Teip. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi amanat pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 ;
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

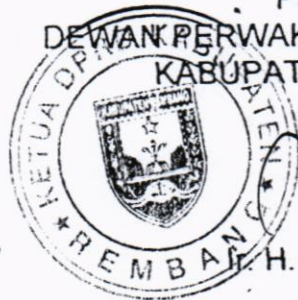
Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juli 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir .
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juli 2012

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua

H. SUNARTO

Wakil Ketua

CATUR WINANTO, SH.

Wakil Ketua

H. MAJID KAMIL, MZ.

Wakil Ketua

SUWANTO



BUPATI REMBANG

BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 1.635 / 2012
NOMOR : 900 / 1.3588 / 2012

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pada Hari ini *Jum'at* tanggal *tiga puluh* bulan *Nopember* Tahun *dua ribu dua belas* , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. MOCH. SALIM : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Ir. H. SUNARTO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
3. CATUR WINANTO,SH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
4. H. MADJID KAMIL MZ : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
5. SUWANTO : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini ;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini ;

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini ;
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 30 Nopember 2012




BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG




Ir. H. SUNARTO

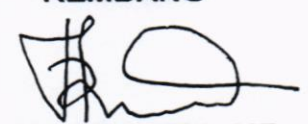
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

REMBANG


CATUR WINANTO, SH.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

REMBANG


H. MAJID KAMIL MZ.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

REMBANG


SUWANTO.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.
- Merimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Perigadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Nopember 2012;
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Nopember 2012 ;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Nopember 2012.

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- DUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang
- TIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ;
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Nopember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



ICH. SUNARTO



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PENETAPAN RAPERDA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2013
Rembang, 30 November 2012**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Kepala Badan/ Dinas/ Kantor se Kab.
Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka **Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A. 2013**, dalam keadaan sehat wal'fiat tiada kurang suatu apa.

Selanjutnya, melalui forum terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang ini.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, melalui forum terhormat ini pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 ini, "Alhamdulillah", dapat disetujui dalam waktu yang tepat sesuai dengan jadwal perencanaan, dengan

disertai semangat kemitraan yang tinggi dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan legislatif. Sehingga hal ini, semakin memperkuat harapan kami akan pentingnya konsistensi kita bersama, dimana DPRD sebagai mitra strategis akan senantiasa mengawal dan mengagendakan proses-proses perencanaan dan penganggaran secara sinkron antara jajaran eksekutif dan legislatif.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam RAPBD tahun anggaran 2013 ini, kita dihadapkan pada tantangan yang sedemikian besar, krisis perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia secara makro. ketidakpastian perkembangan perekonomian dan keuangan secara menyeluruh dapat memberikan efek domino terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah. oleh karena itu, kita tetap mengikuti dan mewaspadai agar langkah-langkah strategi kebijakan daerah dapat diantisipasi secara cepat, tepat dan terukur.

Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengambil langkah-langkah strategis secara tepat, terarah dan konkrit serta menyesuaikan kondisi riil

masyarakat kita. Penting artinya, ini harus kita lakukan dengan optimalisasi penerimaan sumber daya serta ketepatan dalam pendistribusian belanja daerah untuk memberikan ruang gerak dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, berpengaruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya, dengan tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas berprinsip pada efisiensi, efektifitas, tepat guna dan tepat daya, mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik secara utuh.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2013 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, disertai penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Hal ini merupakan

implementasi dari fungsi perencanaan, koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Untuk itu, kami sangat menghargai semangat kerja keras dan kerjasama yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif yang terjalin selama ini. Sehingga melalui APBD ini, akan tercermin kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Program anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan anggaran ini salah satunya adalah upaya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Rembang menuju situasi dan kondisi yang lebih kondusif, dan lebih mandiri, yang pada akhirnya nanti mampu mendorong perwujudan Rembang yang lebih baik dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat beriringan secara komprehensif dan terintegrasi menjadi satu kesatuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, setelah melalui pembahasan yang dinamis baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, pada hari ini kita telah mencapai kesepakatan mengenai program dan kegiatan serta besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Anggaran pendapatan pada RAPBD Tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp.887.138.846.000,- (*Delapan ratus delapan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*)

Selanjutnya untuk Anggaran Belanja RAPBD Tahun 2013, diperkirakan sebesar Rp.900.838.736.000,- (*Sembilan ratus milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), Sehingga terdapat defisit sebesar Rp.13.699.890.000,- (*Tiga belas milyar enam ratus*

7

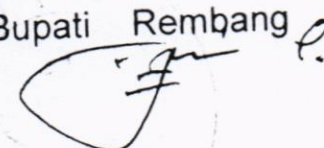
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 13.699.890.000,- (Tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga pada RAPBD Tahun 2013 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 (nol).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang, agar menjadi Kabupaten yang maju, sejahtera dan mandiri. *Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. MOCH. SALIM, M.Hum

PENJELASAN DARI KOMISI B DPRD SEBAGAI PENGUSUL RAPERDA TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN
DI KABUPATEN REMBANG
Dibacakan oleh : MUNTTHOHID, SH

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta staf.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan nikmat, rahmah dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tiada aral suatu apa..... **amin...amin ya robbal alamin**

Peserta Rapat yang saya hormati.

Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan yang tertib dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Mengingat peran dan fungsi pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, khususnya dalam pembangunan sektor perdagangan, diperlukan peraturan yang secara simultan dan sinergis agar dapat dikembangkan untuk memperkuat daya saing pasar tradisional terhadap toko modern.

Dengan meningkatnya daya saing pasar tradisional, maka tidak menutup kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan juga menjadi tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati

berbagai hal yang tidak tersedia di Pasar Modern, oleh karena itu Pasar Tradisional harus mendapat perlindungan, karena :

1. Semakin marak dan menjamurnya berdirinya Pasar Modern di Kabupaten Rembang ;
2. Pertumbuhan Pasar Modern yang terlalu pesat tidak sebanding dengan Pertumbuhan Pasar Tradisional ;
3. Pasar Modern didukung oleh permodalan yang kuat, SDM yang terdidik, manajemen yang kokoh sehingga dapat menjadikan ancaman bagi Pasar Tradisional;

Sehubungan hal tersebut diatas mengakibatkan :

1. Keluhan dari para pedagang kecil yang berada disekitar Pasar Modern/ Supermarket yang berkurang omsetnya ;
2. Kesenjangan yang dapat memicu timbulnya konflik antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern.

Melihat hal tersebut, maka DPRD Kabupaten Rembang melalui hak inisiatifnya menindaklanjuti amanat tersebut dengan menyusun Draft usulan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 83 ayat (2) bahwa: " Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau **Naskah Akademik** " maka perjanjian draft Raperda dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari draft Raperda yang diusulkan dalam Prolegda.

Dengan demikian maka perlu di susun Naskah Akademik sebagai dasar kajian Raperda yang akan diusulkan dengan menggandeng Lembaga Perguruan Tinggi sebagai konsultan dalam Pendampingan Penyusunan Raperda dalam bentuk kerja sama, adapun Perguruan Tinggi yang ditunjuk adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.

Demikian sekilas penjelasan dari kami sebagai komisi pengusul atas raperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten Rembang. Selanjutnya mohon tanggapan dari rekan-rekan Anggota DPRD demi sempurnanya Raperda Inisiatif DPRD ini.

Semoga niat baik yang dilandasi dengan hati yang ihlas dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang ini selalu mendapat ridlo Allah SWT. Amiin yaa Robbal 'Aalamiin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billaahit taufiq wal hidayah.

Akhirul kalam:

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 November 2012
KOMISI B DPRD KAB. REMBANG

Ketua

Hi. HARNO, SE

Sekretaris



JASMANI

**LAPORAN BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGKAJIAN TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN
DI KABUPATEN REMBANG**

A. DASAR PENGKAJIAN

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pasal 48 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh pengusul, oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian;
- c. Usul raperda inisiatif tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dengan nomor pokok 170/583/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
- d. Disposisi Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 November 2012.

B. TUJUAN PENGKAJIAN

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, khususnya Pasal 30 ayat (3), pengkajian yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang diusulkan oleh komisi B bertujuan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

C. PELAKSANAAN PENGKAJIAN

- a. Rapat Badan Legislasi Daerah dalam rangka mengkaji usul raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2012
Jam : Jam 11.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang

- b. Rapat Badan Legislasi Daerah dalam rangka mengkaji usul raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang diikuti oleh:

Ketua : Puji Santoso, S.P.

Wakil Ketua: Mohammad Imam Zarkasi

Anggota : Ridwan, S.H.

Edy Kartono, S.Pd.

S. Wetu Ariani

Gatot Paeran, S.H.

H. M. Noor Hasan, S.H.

H. Yudianto, S.H.

Imro'atus Sholichah

Suci Rahayu, S.H.

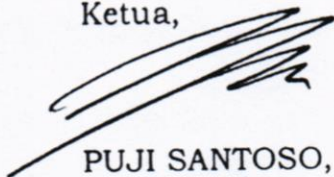
D. HASIL PENGKAJIAN

Setelah dilakukukan pengkajian terhadap rancangan raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang baik menyangkut legal drafting maupun materi muatan, Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang berpendapat bahwa raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang telah layak sebagai raperda inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

E. PENUTUP

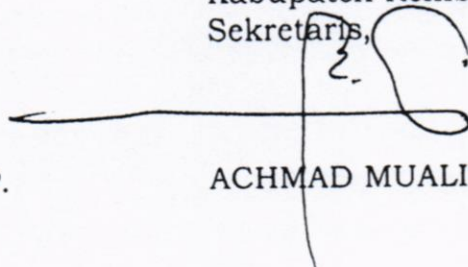
Demikian hasil kajian Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang terhadap rancangan raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada hari ini.

Ketua,



PUJI SANTOSO, S.P.

Rembang, 30 November 2012
Badan Legislasi Daerah DPRD
Kabupaten Rembang
Sekretaris,



ACHMAD MUALIF



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

TANGGAPAN FRAKSI DEMOKRAT

TENTANG

USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN TAHUN ANGGARAN 2012

Jum'at, 30 Nopember 2012

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, para wakil ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Mengawali penyampaian kami terhadap Usulan Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 2012 ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran tak kurang suatu apa dan dapat bertemu bersama dalam sidang ini.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT;

Setelah Komisi B DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan Serangkaian Pembahasan termasuk didalamnya penjaringan Aspirasi Masyarakat langsung dalam Public hearing terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko Modern di Kabupaten Rembang. Dan terdapat beberapa Penyempurnaan-penyempurnaan serta didasari dengan Naskah Akademik oleh karena itu kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Menyetujui Usulan Rancangan

Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ditetapkan menjadi Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Tentang Penyempurnaan Rancangan ini nantinya akan dibahas dan diperdalam lagi melalui Pansus.

Adapun beberapa catatan yang kami sampaikan berkaitan dengan Usulan Raperda ini antara lain :

1. Dalam Rancangan ini belum menyinggung masalah pasar desa yang mungkin efeknya lebih besar dengan keberadaan pasar modern/ pasar perbelanjaan.
2. Mengingat Era globalisasi dan perdagangan bebas dunia maka dalam Perda ini nanti harus di antisipasi jangan sampai Perda melarang tetapi aturan di atasnya diperbolehkan.
3. Pada bagian ke empat pasal 32 waktu pelayanan, hendaknya tidak dibatasi karena sudah dibatasi dengan zonasi jarak pendiriannya ..

Demikian tanggapan fraksi ini kami sampaikan, semoga dalam proses-proses pembahasan selanjutnya, Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ini bisa lebih disempurnakan dengan baik, bermanfaat untuk kemasalahatan umat, terutama dalam bidang perekonomian di kabupaten Rembang.

Akhirnya atas perhatian hadirin sidang dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

H. HARNO, SE



SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH

**TANGGAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP USUL RAPERDA INISIATIF DPRD KAB. REMBANG
TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI
KABUPATEN REMBANG.**

FRAKSI PARTAI GOLKAR (oleh SRI REJEKI, SH)

Ass. Wr. Wb.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD yang saya hormati.

Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap usul Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang pada dasarnya Fraksi Partai Golkar sepakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan PerUU yang ada. Dari Fraksi Partai Golkar cukup itu karena sudah dikaji lebih dalam

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

FRAKSI PPP (Oleh SA'DULLAH)

Ass. Wr. Wb.

Kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang saya muliakan,

Pada prinsipnya Fraksi PPP menyetujui atas adanya Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Akan tetapi perlu untuk menjadi catatan justru dalam pengaturan Perda tersebut untuk Pro rakyat, Terimakasih

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

FRAKSI PKB (Oleh HM. NOOR HASN, SH)

Ass. Wr. Wb.

Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati,

Saya sangat mengapresiasi terhadap usulan Komisi B

1. Untuk menanggapi usulan Komisi B bahwa harus kita pegangi filosofi / kehendak dari Komisi B ini sangat penting untuk menata, mengatur dan kemudian melindungi pedagang tradisional. Maka ini kita harapkan nanti fotocopy yang dibacakan oleh Bp. Thohid nanti dibagi. Setiap Anggota Banleg ataupun Pansus harus memegang, sehingga tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh Komisi B.
2. Ini perlu kehati-hatian, biarpun waktu tinggal 1 bulan dan tidak harus seperti dikejar-kejar celeng, sehingga ini karena menyangkut kepentingan ekonomi rakyat.
3. Ini tentang judul kurang sesuai apabila kita amati arti tujuan dari pembentukan Perlindungan pasar Tradisional ini. Saya kira tiga point itu yang kita sampaikan, mohon maaf Pak Puji selaku Sekretaris Fraksi, saya tidak bisa membaca, karena sudah lama tidak membaca.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

FRAKSI PDI PERJUANGAN (Oleh RIDWAN, SH)

Ass. Wr. Wb.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami muliakan para Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang Sdr.
Sekretaris.....MERDEKA!!!!!!!!!!!!!!

Fraksi PDI Perjuangan ingin menjelaskan 3 hal :

1. Belum terakomodirnya eksistensi Pasar Desa, maupun Pasar Musiman, perlu untuk kita akomodir, perlu kita tata, kita back up bahkan perlu kita Advokasi eksistensinya. Mengingat mulai jaman Mak lampir sampai sekarang ini juga masih ada Pasar Musiman dan pasar Setunan.
2. Kami juga ingin menegaskan terkait jarak, sebagai wujud statement pertama saya, yaitu Advokasi, maka kita perlu mem backup, mengadvokasi betul tentang jarak/zonasi. Untuk Fraksi PDI Perjuangan meminta jarak 1.5 kilometer dari Pasar Tradisional untuk wilayah diluar wilayah kota Rembang.
3. Bahwa untuk setiap pendirian Pasar Modern ini wajib melibatkan pengusaha lokal yang bergerak dibidang perdagangan dalam hal ini pemilik toko kelontong, kios dll. Juga harus seperti tujuan masyarakat sekitar artinya kita tidak hanya berpaku pada Perda IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)atau HO saja yang hanya depan belakang, kiri kanan 4 orang cukup, tapi ini karena Targetnya adalah menciptakan Perekonomian pemberdayaan ekonomi rakyat, maka wajib hukumnya melibatkan rakyat itu sendiri dalam Kebijakan Daerah.

Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu' alikum Wr. Wb.....MERDEKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FRAKSI PAN (Oleh JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE)

Ass. Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD .

Tangapan kami tentang Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang,

Perlindungan ini asumsinya/filosofinya sebetulnya tidak hanya melindungi Pasar Tradisional. Esensinya adalah melindungi potensi ekonomi lokal baik dari serangan pengusaha2 yang berkapital besar ataupun aliran dana dari Luar Negeri. Dapat kita ketahui bahwa Alfamart saja 50 % sahamnya itu dipegang oleh Carrefour. Saya kira esensi yang paling utama ada disitu. Kemudian yang perlu kami sampaikan, karena kami juga termasuk pengusul bahwa pembahasan kemarin memang mungkin masih banyak hal-hal yang belum terakomodir, satu hal yang kami catat pentingnya melakukan kuota kecamatan tertentu, misalkan kec. Rembang kuotanya hanya relevan Pasar Modern Kec. Lain juga ditentukan kuotanya, hal itu yang belum sempat kita bahas secara detail ditemen-temen Komisi B. Tetapi esesinya kami mendukung Raperda ini dan kemudian untuk dibahas dalam langkah yang lebih lanjut yaitu Panitia Khusus , tanpa merubah perubahan-perubahan yang sudah ada. Hanya catatan-catatan itu yang kami harapkan menjadi konsiten kita untuk membuat Raperda ini menjadi lebih baik. Saya kira itu saja, Terimakasih..

Wassalamu' alikum Wr. Wb

FRAKSI BINTANG KEADILAN 9 dr. ROCHMAD ISNAINI)

Ass. Wr. Wb.

Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan Bapak Ibu sekalian anggota DPRD .

Sebelumnya kami mohon perhatian, karena ini CETHO yang kita sampaikan pada prinsipnya

1. FBK sepakat usulan Raperda Inisiatif yang disampaikan oleh Komisi B, untuk selanjutnya dibahas dalam forum Pansus, sebagai sarana perlindungan bagi Para pedagang kecil.
2. Dsepakat juga apa yang disampaikan oleh rekan2 sebelumnya bahwa keberadaan Pasar desa yang selama ini pembinaanya dalm lingkup BPMPKB untuk dibahas juga dalam Raperda yang akan kita bahas berikuutnya.
3. Kalau memungkinkan kita berharap juga keberadaan pasar Hewan ini juga bisa dimasukkan didalam salah satu Pasal didalam Raperda Pusat untuk dibahas selanjutnya.

Barangkali ini yang kami sampaikan dalam kesempatan ini mensikapi Raperda Inisiatif yang diusulkan rekan2 Komisi B. Dan sekali lagi untuk selanjutnya bisa dibahas didalam Pansus2 yang akan dibentuk dalam waktu yang akan datang. Wassalamu' alikum Wr. Wb.

**JAWABAN PENGUSUL (KOMISI B) ATAS USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI
KABUPATEN REMBANG
(OLEH JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE)**

Ass. Wr. Wb.

Mencoba menanggapi tanggapan Fraksi, Pertama temen2 Fraksi Demokrat tentang Pasar desa dan itu saya lihat juga disampaikan oleh beberapa Fraksi PDI-P juga temen2 FBK, Pemahaman kami Perda ini tidak bisa menjangkau atau ruang lingkungnya tidak bisa menjangkau Pasar Desa, Kerena Perda ini artinya kita lindungi, kita atur sebatas hanya Pasar Tradisional yang dikelolai oleh Pemerintah Daerah, kami tyidak mungkin mengatur Pasar Desa, karena ada Otonomi Desa, tetapi pada saat hearing memang kami mengundang temen2 pengelola Pasar Desa supaya ikut berbicara sehingga, mereka bisa menjelaskan kondisi riil dilapangan bida menjelaskan sejauh mana dampak dai Toko Modern. Penjeladsan tentang Pasar Desa perlu melihat aturannya, harapan kami kemarin begitu Naskah Akademik ataupun salah satu lembaga yang menurut hemat kami berkompeten, mudah2 tidak ada tabrakan aturan atau kesimpangsiuran aturan, kemudian masih yang disampaikan temen2 Demokrat tentang batasan Waktu. Batasan waktu ini mengacu pada Peraturan Presiden disitu sudah sangat dijelaskan batasan waktunya mulai dari jam 09.00 sampai jam 10.00 itu batasan waktu maksimal, hanya yang kita coba atau ide baru dari temen2 Komisi B kita coba mencari dasar Hukum yang kuat supaya Pasar Modern yang ada dijalan Arteri atau jalan besar tidak mengganggu Pasar Tradisional, bisa dimungkinkan buka 24 jam yang dijalan besar. Kami ambil contoh dijalan Pantura.

Dari Golkar terimakasih atas usulannya, dari PPP harapanya agar tetap Pro Rakyat, Inshaallah asal tetap dikawal Raperda ini sangat Pro rakyat.

Dari Fraksi PKB kami setuju bahwa yang seperti yang kami sampaikan didepan tadi filosofi dari perlindungan Tradisional ini esensinya melindungi ekonomi Rakyat kecil. Karena ekonomi rakyat kecil sebetulnya tidak hanya dipasar, tetapi banyak sector yang lain, itu yang harus kita hati-hati dan itu juga selalu menjadi konsen Komisi B sebagai Pengusul, contoh kami selalu bicara tentang Pemeliharaan Pasar, kami selalu bicara tentang peningkatan struktur Pasar. Jadi mudah-mudahan dengan Raperda ini akan mendorong temen2 Pasar Tradisional untuk semakin bisa berkompetisi dengan baik. Tentang judul yang belum sesuai kami belum paham yang dimaksudkan apa? , tetapi kami berharap ini akan lebih diseriusi di Pansus, jadi tidak merubah kesempatan ini untuk menjadikan draft Raperda ini menjadi rancangan yang akan kita bahas di 2012.

Tentang PDIP Pasar Desa tadi sudah kami jawab tentang jarak 1.5 km antara 1 dan 1.5 km masih relative sulit dibedakan, tetapi kami harapkan usula ini langsung disampaikan saja ketika pembahasan Pansus. Jadi menjadi catatan kita bersama harus setuju untuk yang nomor 3 membangun komunikasi antara pelaku ekonomi setempat, sehingga ketika Pemerintah Daerah mengambil Keputusan untuk memberikan ijin itu tidak hanya dengan melihat, tidak hanya meminta ijin kepada tetangga kanan kiri setempat, tetapi juga memperhatikan dari pedagang2 yang kena dam[paknya.

Dari FBK Pasar Desa sudah kami jawab, kemudian Pasar hewan saya kira ini Perda yang terpisah Bapak. Kalau idenya saya pikir baik tetapi kekhawatiran kami kalau terlalu banyak muatan yang kita masukan kami tidak yakin bnisa focus, Saya kira itu jawaban saya dari Komisi B. Terima Kasih

Ass. Wr. Wb.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO
MODERN DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi " Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah " dan ayat (2) yang berbunyi " Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik " ;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Komisi B DPRD kabupaten Rembang mengajukan usul Penyusunan Raperda Inisiatif tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern guna melindungi dan memberdayakan pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan dan saling memperkuat serta saling menguntungkan ;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 84 ayat (7) yang berbunyi " Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Persetujuan ;
 - b. Persetujuan dengan Perubahan ; atau
 - c. Penolakan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu adanya penetapan persetujuan usul Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

19. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 53 / M – DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

- PENETAPAN PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Nopember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. SUNARTO



